



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BENGKALIS

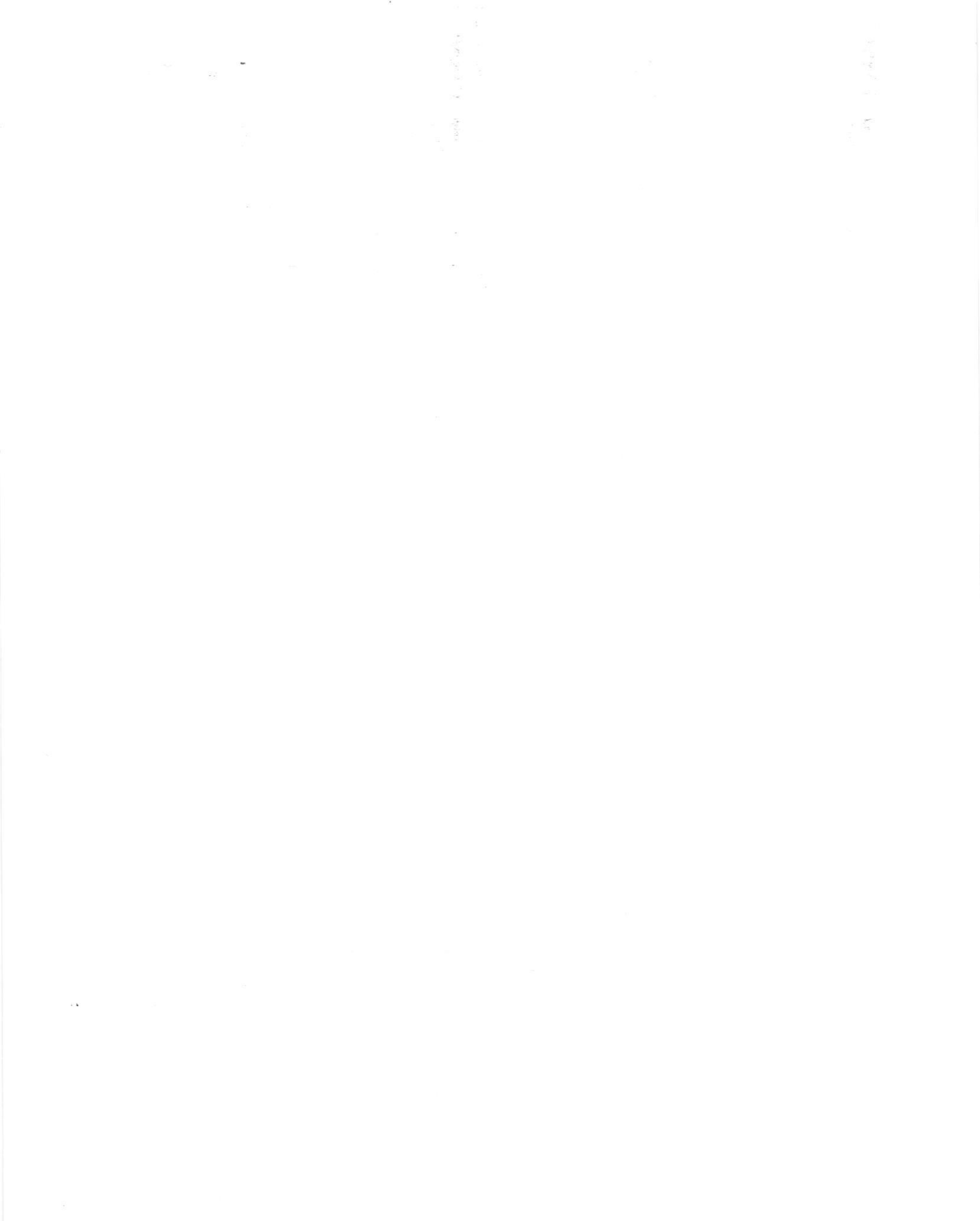
LAPORAN KEUANGAN UN AUDIT

TAHUN 2022



Alamat : Jalan Hang Tuah No. 08 Bengkalis Kode Pos : 28712
Telepon (0766) 23645 Fax. (0766) 23644
E-mail : dppkbbengkalis@gmail.com





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA**

**Jl. HANG TUAH No. 08
Telp. (0766) 23645 Fax. (0766) 23644
BENGKALIS 28712**

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Per 31 Desember Tahun Anggaran 2022 yang terdiri dari:

- (1) Laporan Realisasi Anggaran;
- (2) Laporan Operasional;
- (3) Laporan Perubahan Ekuitas;
- (4) Neraca;
- (5) Catatan atas Laporan Keuangan.

Sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggungjawab Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Bengkalis, Februari 2023

**Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis**



Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah S.W.T yang selalu menuntun dan membimbing serta memberikan berkah dan rahmat-Nya pada kita semua. Di awal tahun 2023 ini Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis telah menyusun Laporan Keuangan Un Audit per 31 Desember 2022 sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah, dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2022 yang dialokasikan kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis secara tepat waktu. Laporan Keuangan dimaksud mencakup: (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Laporan Operasional (3) Laporan Perubahan Ekuitas, (4) Neraca, dan (5) Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam Laporan Keuangan Un Audit ini tersedia informasi yang relevan mengenai posisi keuangan maupun capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis selama 1 Tahun Anggaran 2022.

PP No. 71 Tahun 2010 tentang
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
Paragraf 28 Kerangka Konseptual:
Laporan Keuangan Kementerian Negara/
Lembaga/Satuan KERJA Perangkat
Daerah Setidak-tidaknya terdiri dari:
a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
b. Laporan Perubahan SAL (LPSAL);
c. Neraca;
d. Laporan Operasional;
e. Laporan Arus Kas (LAK);
f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Paragraf 15 menyebutkan, komponen tersebut disajikan oleh tiap-tiap entitas kecuali point e dan point b yang hanya disajikan oleh bagian perbendaharaan umum.

atas pertanggungjawaban Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis dalam pengelolaan sumber daya dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sekaligus dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah yang menghendaki adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui penyampaian laporan keuangan yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan (SAP) sehingga

dapat dihasilkan laporan keuangan yang akurat dan memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan untuk menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Penyusunan Laporan Keuangan Un Audit Per 31 Desember 2022 ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, tanggapan, dukungan, saran, maupun kritik yang membangun dari *stakeholders* sangat diharapkan. Selanjutnya, untuk meningkatkan kinerja sekaligus melakukan penyempurnaan dalam menyajikan Laporan Keuangan secara tepat waktu dan akurat sebagai salah satu upaya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Bengkalis, Februari 2023

**Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis**



*** N. HAMBALI, S.Pd.I**
NIP. 19670305 198811 1 001

RINGKASAN



esuai pasal PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, serta Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis selaku salah satu entitas akuntansi berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD Kabupaten Bengkalis yang salah satunya dialokasikan dan dikelola oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis.

Tujuan pelaporan keuangan Un Audit adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis selama periode pelaporan 1 Januari s.d 31 Desember 2022 yang bersumber dana dari APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2022.

1. LAPORAN REALISASI DAN ANGGARAN

Laporan Realisasi dan Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 .

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis tidak termasuk salah satu SKPD yang mengelola anggaran maupun realisasi pendapatan daerah.

Realisasi Belanja Daerah per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 19.760.149.330,00 atau mencapai 81,10% dari anggarannya. Jumlah realisasi Belanja Daerah tersebut terdiri dari realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 18.434.284.429,00 atau 80,17% dari anggarannya sebesar Rp. 22.993.020.290,00 dan realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 1.325.864.901,00 atau 96,62% dari anggarannya sebesar Rp. 1.372.195.000,00.

Realisasi Defisit per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. (19.760.149.330,00) yang berarti mencapai 81,10% dari yang dianggarkan dalam APBD TA 2022 sebesar minus Rp. (24.365.215.290,00).

	31 Desember 2022		TA 2021
	Anggaran	Realisasi	Realisasi
Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00
Belanja Daerah	24.365.215.290,00	19.760.149.330,00	13.228.575.923,00
Surplus (Defisit)	(24.365.215.290,00)	(19.760.149.330,00)	(13.228.575.923,00)

2. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menggambarkan seluruh dana atau uang yang digunakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Bengkalis dalam menjalankan Kegiatan Operasionalnya selama periode 1 Januari s/d 31 Desember 2022 .

Laporan Operasional menyajikan pos-pos Pendapatan LO, Beban, surplus/defisit dari kegiatan Operasional. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis tidak termasuk salah satu SKPD yang mengelola pendapatan dan pembiayaan daerah. Laporan Operasional Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Per 31 Desember Tahun 2022 terdiri dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp. 612.046.950,00, beban operasi sebesar Rp. 18.387.010.002,24 dan Surplus/defisit Per 31 Desember Tahun 2022 adalah sebesar Rp. (18.615.366.902,91) Untuk lebih jelasnya, rincian Pendapatan dan beban 31 Desember Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada lampiran Laporan Operasional.

Pendapatan	612.046.950,00
Jumlah Pendapatan	612.046.950,00
Beban Pegawai	5.620.191.905,00
Beban Barang	2.822.763.793,50
Beban Jasa	4.308.530.022,00
Beban Pemeliharaan	437.100.245,74
Beban Perjalanan Dinas	3.552.583.911,00
Beban Hibah	21.838.000,00
Beban Penyusutan	832.174.684,00
Beban Amortisasi	8.229.166,67
Beban Lain-Lain	1.624.002.125,00
Jumlah Beban	19.227.413.852,91
Surplus/Defisit	(18.615.366.902,91)

3. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS









Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Total saldo pos Ekuitas Per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 8.064.840.221,51 mengalami penurunan kekayaan bersih sebesar Rp. 1.144.782.427,09 jika dibandingkan dengan ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 6.920.057.794,42

4. NERACA

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana Per tanggal 31 Desember 2022 .

Jumlah Aset bersih (setelah penyusutan) per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 7.067.490.506,42. yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp. 696.102.164,75, Aset Tetap sebesar Rp. 6.368.096.675,00 dan aset lainnya Rp. 3.291.666,67.

Sementara itu, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis per 31 Desember 2022 memiliki kewajiban (hutang) jangka pendek sebesar Rp. 10.948.429,00 Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 7.056.542.077,42.

	TA 2022	TA 2021
 Aset	8.075.974.914,51	6.931.001.155,42
 Aset Lancar	126.459.496,25	313.410.016,75
 Aset Tetap	7.949.515.418,26	6.609.361.972,00
 Aset Lainnya	0,00	8.229.166,67
 Kewajiban	11.134.693,00	10.943.361,00
 Kewajiban Jk. Pendek dan Panjang	11.134.693,00	10.943.361,00
 Ekuitas	8.064.840.221,51	6.920.057.794,42
 Ekuitas	8.064.840.221,51	6.920.057.794,42

5. PELAPORAN KINERJA

Untuk Tahun Anggaran 2022, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis telah merencanakan untuk melaksanakan 14 (Empat Belas) Program dan 45 (Empat Puluh Lima) Kegiatan dengan anggaran Belanja langsung yang tersedia sebesar Rp. 19.760.149.330,00 atau 81,10% dari keseluruhan anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis sebesar Rp. 24.365.215.290,00.

Hingga 31 Desember tahun anggaran 2022, belanja langsung yang telah terealisasi sebesar Rp. 19.760.149.330,00 atau mencapai 81,10% dari yang dianggarkan sebesar Rp. 19.760.149.330,00 dengan capaian kinerja fisik (output) sebesar 79,14%.

6. INFORMASI LAINNYA

Berdasarkan Perda Kabupaten Bengkalis No. 09 Tahun 2008, terhitung mulai awal Januari 2009, struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis mengalami perubahan guna menyesuaikan dengan ketentuan PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan diberlakukannya Perda tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis tidak mengalami perubahan nama organisasi.



DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BENGKALIS

**LAPORAN
REALISASI ANGGARAN
PER 31 DESEMBER 2022**



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Untuk Berakhir Sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REFF	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	RASIO (%)	REALISASI 2021
PENDAPATAN	5.1.1				
PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1.A				
Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.A1				
Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.A2				
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	5.1.1.A3				
Lain-lain PAD yang Sah	5.1.1.A4				
Jumlah Pendapatan Asli Daerah					
PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.B				
TRANSFER PEMPUS - DANA PERIMBANGAN	5.1.1.B1				
Dana Bagi Hasil	5.1.1.B1a				
Dana Alokasi Umum	5.1.1.B1b				
Dana Alokasi Khusus - Fisik	5.1.1.B1c				
Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	5.1.1.B1d				
Jumlah Transfer Pempus - Dana Perimbangan					
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	5.1.1.B2				
Dana Otonomi Khusus	5.1.1.Ba				
Dana Penyesuaian	5.1.1.Bb				
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Lainnya					
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat					
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	5.1.1.B3				
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.1.B3a				
Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi	5.1.1.B3b				
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya					
Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi					
Jumlah Pendapatan Transfer					
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.1.1.C				
Pendapatan Hibah	5.1.1.C				
Pendapatan Dana Darurat	5.1.1.C				
Pendapatan Lainnya	5.1.1.C				
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah					
TOTAL PENDAPATAN					
BELANJA	5.1.2				
BELANJA OPERASI	5.1.2.A				
Belanja Pegawai	5.1.2.A1	7.443.906.642,00	5.620.191.905,00	75,50	5.391.187.339,00
Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.A2	15.549.113.648,00	12.814.092.524,00	82,41	6.508.447.758,00
Belanja Subsidi	5.1.2.A3				
Belanja Hibah	5.1.2.A4				
Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.A5				
Jumlah Belanja Operasi		22.993.020.290,00	18.434.284.429,00	80,17	11.899.635.097,00
BELANJA MODAL	5.1.2.B				
Belanja Tanah	5.1.2.B1				
Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.B2	610.165.000,00	575.429.905,00	94,31	330.203.000,00
Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.2.B3	762.030.000,00	750.434.996,00	98,48	998.737.826,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.B4				
Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.B5				
Belanja Aset Lainnya	5.1.2.B6				
Jumlah Belanja Modal		1.372.195.000,00	1.325.864.901,00	96,62	1.328.940.826,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	5.1.2.C				
Belanja Tidak Terduga	5.1.2.C				
Jumlah Belanja Tidak Terduga					
JUMLAH BELANJA		24.365.215.290,00	19.760.149.330,00	81,10	13.228.575.923,00

TRANSFER	5.1.3				
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	5.1.3.A				
Transfer Bagi Hasil Pajak	5.1.3.A				
Transfer Bagi Hasil Retribusi	5.1.3.A				
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya					
Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan					
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	5.1.3.B				
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	5.1.3.B				
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	5.1.3.B				
Jumlah Transfer Bantuan Keuangan					
JUMLAH TRANSFER					
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER					
SURPLUS (DEFISIT)	5.1.4				
PEMBIAYAAN	5.1.5				
PENERIMAAN	5.1.5.A				
Penggunaan SiLPA Tahun Lalu	5.1.5.A				
Pencairan Dana Cadangan	5.1.5.A				
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan					
Penerimaan Pinjaman Daerah					
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah					
Penerimaan Piutang Daerah					
Total Penerimaan					
PENGELUARAN	5.1.5.B				
Pembentukan Dana Cadangan	5.1.5.B				
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.1.5.B				
Pembayaran Biaya Pinjaman Luar Negeri					
Pemberian Pinjaman Daerah					
ADB					
Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga					
Total Pengeluaran					
PEMBIAYAAN NETTO					
SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran)	5.1.6	-24.365.215.290,00	-19.760.149.330,00	81,10	-13.228.575.923,00

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

Bengkalis, Desember 2022

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KEUANGAN BERENCANA
KABUPATEN BENGKALIS





DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BENGKALIS

**LAPORAN OPERASIONAL
PER 31 DESEMBER 2022**



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	Reff.	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/P enurunan	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL					
2	PENDAPATAN	5.4.1.				
3	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.4.1.A.				
4	Pendapatan Pajak Daerah	5.4.1.A.1				
5	Pendapatan Retribusi Daerah	5.4.1.A.2				
6	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.4.1.A.3				
7	Lain-lain PAD yang Sah	5.4.1.A.4				
8	Jumlah Pendapatan Asli Daerah					
9	PENDAPATAN TRANSFER	5.4.1.B.				
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	5.4.1.B.1				
11	Dana Bagi Hasil	5.4.1.B.1.a				
12	Dana Alokasi Umum	5.4.1.B.1.b				
13	Dana Alokasi Khusus - Fisik	5.4.1.B.1.c				
14	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	5.4.1.B.1.d				
15	Jumlah Pendapatan Transfer Pempus - Dana Perimbangan					
16	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	5.4.1.B.2				
17	Dana Otonomi Khusus					
18	Dana Penyesuaian	5.4.1.B.2.a				
19	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya					
20	TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA/ PROVINSI	5.4.1.B.3				
21	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.4.1.B.3.a				
22	Bantuan Keuangan Pemprov/Kab./ Kota Lainnya	5.4.1.B.3.b				
23	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya					
24	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya/ Provinsi					
25	Jumlah Pendapatan Transfer					
26	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.4.1.C.				
27	Pendapatan Hibah	5.4.1.C.1				
28	Pendapatan Lainnya	5.4.1.C.2	612.046.950,00	737.707.163,00		
29	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah		612.046.950,00	737.707.163,00		
30	JUMLAH PENDAPATAN		612.046.950,00	737.707.163,00		
31	BEBAN	5.4.2.				
32	BEBAN OPERASI	5.4.2.A.				
33	Beban Pegawai	5.4.2.A.a	5.620.191.905,00			
34	Beban Persediaan	5.4.2.A.b	2.822.763.793,50			
35	Beban Jasa	5.4.2.A.c	4.308.530.022,00			
36	Beban Pemeliharaan	5.4.2.A.d	437.100.245,74			
37	Beban Perjalanan Dinas	5.4.2.A.e	3.552.583.911,00			
38	Beban Bunga					
39	Beban Subsidi	5.4.2.A.f				
40	Beban Hibah	5.4.2.A.g				
41	Beban Bantuan Sosial	5.4.2.A.h				
42	Beban Penyusutan	5.4.2.A.i	832.174.684,00			
43	Beban Amortisasi	5.4.2.A.j	8.229.166,67			
44	Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.A.k				
45	Beban Cadangan Kerugian Investasi Non Permanen					
46	Beban Penghapusan Aset					
47	Beban Hibah Aset	5.4.2.A.l	21.838.000,00			
48	Beban Lain-lain	5.4.2.A.m	1.624.002.125,00			
49	Beban Dana BOS					
50	Jumlah Beban Operasi		19.227.413.852,91	13.689.662.877,25		
51	BEBAN TRANSFER	5.4.2.B.				
52	Beban Transfer Bagi hasil Pajak	5.4.2.B.a				
53	Beban Transfer Retribusi	5.4.2.B.b				
54	Beban Transfer Bantuan Keuangan	5.4.2.B.c				
55	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa					
56	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya					
57	Jumlah Beban Transfer					
58	JUMLAH BEBAN					
59	JUMLAH SURPLUS / DEFISIT DARI OPERASI		(19.227.413.852,91)	(13.689.662.877,25)		

50	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
51	SURPLUS NON OPERASIONAL	5.4.3.			
62	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	5.4.3.a			
63	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
54	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				
55	Jumlah Surplus Non Operasional				
66	DEFISIT NON OPERASIONAL	5.4.4.			
67	Defisit Penjualan Aset Non Lancar				
58	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
69	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				
70	Jumlah Defisit Non Operasional				
71	JUMLAH SURPLUS / DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
72	SURPLUS / DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA				
73	POS LUAR BIASA				
74	Pendapatan Luar Biasa				
75	Beban Luar Biasa				
76	POS LUAR BIASA				
77	SURPLUS / DEFISIT - LO	5.4.5.	(18.615.366.902,91)	(12.951.955.714,25)	

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

Bengkalis, Februari 2022

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BENGKALIS**



NIP. 19670305 198811 1 001



DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BENGKALIS

NERACA
PER 31 DESEMBER 2022



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Uraian	Reff	2022 (Rp)	2021 (Rp)
2	3	4	5
ASET	5.3.1		
ASET LANCAR	5.3.1.A		
Kas di Kas Daerah	5.3.1.A.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.A.2		
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.A.3		
Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.A.4		
Kas di Bendahara JKN	5.3.1.A.5		
Kas di BLUD	5.3.1.A.6		
Kas di Bendahara BOS	5.3.1.A.7		
Investasi Jangka Pendek			
Piutang Pajak	5.3.1.A.8		
Piutang Retribusi	5.3.1.A.8		
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.A.8		
Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pusat	5.3.1.A.8		
Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi	5.3.1.A.8		
Piutang Lainnya	5.3.1.A.8		
Penyisihan Piutang	5.3.1.A.9		
Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.A.10		
Persediaan	5.3.1.A.11	126.459.496,25	313.410.016,75
Jumlah Aset Lancar		126.459.496,25	313.410.016,75
INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.B		
Investasi Non Permanen	5.3.1.B.1		
Investasi Non Permanen	5.3.1.B.1		
Investasi Non Permanen Diragukan Tertagih	5.3.1.B.1		
Jumlah Investasi Non Permanen			
Investasi Permanen	5.3.1.B.2		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.3.1.B.2		
Investasi Permanen Lainnya			
Jumlah Investasi Permanen			
Jumlah Investasi Jangka Panjang			
ASET TETAP	5.3.1.C		
Tanah	5.3.1.C.1	373.525.000,00	373.525.000,00
Peralatan dan Mesin	5.3.1.C.2	6.645.269.815,12	5.550.493.513,74
Gedung dan Bangunan	5.3.1.C.3	7.324.534.075,85	6.246.982.246,97
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.3.1.C.4		
Aset Tetap Lainnya	5.3.1.C.5	35.219.800,00	35.219.800,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	5.3.1.C.6		
Akumulasi Penyusutan	5.3.1.C.7	(6.429.033.272,71)	(5.596.858.588,71)
Jumlah Aset Tetap		7.949.515.418,26	6.609.361.972,00
DANA CADANGAN	5.3.1.D		
Dana Cadangan	5.3.1.D		
Jumlah Dana Cadangan (41)			
ASET LAINNYA	5.3.1.E		
Tagihan Penjualan Angsuran			
Tuntutan Ganti Rugi	5.3.1.E.1		
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.3.1.E.2		
Aset Tidak Berwujud	5.3.1.E.3	39.500.000,00	39.500.000,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud		-39.500.000,00	-31.270.833,33
Asct Lain-lain	5.3.1.E.5		
Jumlah Aset Lainnya		0,00	8.229.166,67
JUMLAH ASET		8.075.974.914,51	6.931.001.155,42

KEWAJIBAN	5.3.2.		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2.A		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.A.1		
Utang Biaya Pinjaman Luar Negeri	5.3.2.A.2		
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang			
Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.A.3		
Utang Pihak Ketiga	5.3.2.A.4		
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.A.5	11.134.693,00	10.943.361,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		11.134.693,00	10.943.361,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	5.3.2.B		
Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan			
Utang Dalam Negeri - Obligasi			
Premium (Diskonto) Obligasi			
Pendapatan Diterima Dimuka			
Utang Jangka Panjang Lainnya			
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang			
JUMLAH KEWAJIBAN		11.134.693,00	10.943.361,00
EKUITAS	5.3.3.	8.064.840.221,51	6.920.057.794,42
JUMLAH EKUITAS		8.064.840.221,51	6.920.057.794,42
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		8.075.974.914,51	6.931.001.155,42

Bengkalis, Februari 2023

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BENGKALIS**





DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BENGKALIS

**LAPORAN PERUBAHAN
EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2022**



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	Cat.	2022	2021
1	EKUITAS AWAL	5.6.1.	6.920.057.794,42	6.760.313.765,67
2	SURPLUS/DEFISIT - LO	562	(18.615.366.902,91)	(12.951.955.714,25)
3	RK PPKD	563	19.760.149.330,00	13.434.636.395,57
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN /KESALAHAN MENDASAR :	564	-	(322.936.652,57)
5	Koreksi Nilai Piutang			
6	Koreksi Nilai Penyisihan Piutang			
7	Koreksi Nilai Persediaan			
8	Koreksi Investasi Non Permanen			
9	Koreksi Investasi Non Permanen Diragukan Tertagih			
10	Koreksi Nilai Aset Tetap			(322.936.652,57)
11	Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap			
12	Koreksi Pembayaran Tuntutan Ganti Rugi			
13	Koreksi Nilai Aset Tidak Berwujud			
14	Koreksi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud			
15	Koreksi Nilai Aset Lain-lain			
16	Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain			
17	Koreksi Pendapatan Diterima Dimuka			
18	Koreksi Utang Kepada Pihak Ketiga			
19	Koreksi Utang Jangka Pendek Lainnya			
20	Koreksi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah			
	Total	565	8.064.840.221,51	6.920.057.794,42

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

Bengkalis, Februari 2023
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA





DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BENGKALIS

**CATATAN ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2022**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan pasal 290 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dengan perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis selaku salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis berkewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan, dalam hal ini Laporan Keuangan Un Audit Tahun 2022. Laporan Keuangan tersebut disampaikan sebagai wujud Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2022 yang salah satunya dialokasikan dan dikelola oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis.

Tujuan pelaporan keuangan Laporan Keuangan Un Audit Tahun 2022 ini adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis selama periode pelaporan 1 Januari s.d 31 Desember 2022 yang bersumber dana dari APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2022.

Dalam menyusun laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis mempunyai tujuan dan maksud sebagai berikut:

- a. Menyajikan informasi tentang kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. Menyajikan informasi tentang kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;

- c. Menyajikan informasi tentang jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil yang telah dicapai;
- d. Menyajikan informasi tentang bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya; dan
- e. Menyajikan informasi evaluasi keputusan/kebijakan yang diambil dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas terhadap anggaran.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan ini didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, khususnya bagian yang mengatur Keuangan Negara;
- b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- e) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- f) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
- g) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- j) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
- l) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

- m) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan perubahan kedua Permendagri Nomor 21 Tahun Anggaran 2011;
- n) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
- o) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2021.
- p) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2021 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2022.
- q) Peraturan Kepala Daerah Nomor 92 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2022;
- r) Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2022 tentang Penetapan PAPBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2022;
- s) Peraturan Kepala Daerah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penjabaran PAPBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2022;
- t) Peraturan Kepala Daerah Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan PAPBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2022.

1.3 Komponen Laporan Keuangan

Komponen Laporan Keuangan pokok yang disajikan terdiri dari:

a) Laporan Realisasi Anggaran

Menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh entitas akuntansi, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

b) Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan pos-pos Pendapatan LO, Beban, surplus/defisit dari kegiatan Operasional.

c) Neraca

Menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai asset, kewajiban dan Ekuitas pada tanggal tertentu.

d) Laporan Perubahan Ekuitas

Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit LO, koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yaitu dampak kumulatif yang disebabkan perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang mendasar seperti Persediaan, perubahan nilai aset.

e) Catatan Atas Laporan Keuangan

Menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai (*full disclouser*).

1.4 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika yang dipergunakan dalam penulisan Catatan atas Laporan Keuangan ini terdiri dari 7 (*tujuh*) bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang informasi umum berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan meliputi:

1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan;
2. Landasan hukum yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
3. Komponen laporan keuangan;
4. Serta sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD SKPD

Bab ini terbagi atas 3 (tiga) bagian, yaitu:

1. **Ekonomi Makro**, memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi yang dijadikan landasan penyusunan APBD dan perkembangannya dalam perubahan APBD sampai dengan pelaksanaan APBD akhir tahun anggaran.

2. **Kebijakan Keuangan**, memuat penjelasan mengenai kebijakan keuangan yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Bengkalis sampai dengan akhir tahun anggaran yang berimplikasi terhadap perubahan posisi keuangan.
3. **Pencapaian Target Kinerja**, memuat penjelasan mengenai keberhasilan pencapaian target kinerja yang dicerminkan melalui indikator pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun pelaporan.

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD

Bab ini memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja SKPD berupa:

1. **Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan** yaitu gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik dan atau gambar.
2. **Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan**; berisi penjelasan faktor pendorong serta penghambat pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Bab IV Kebijakan Akuntansi

Bab ini menguraikan tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan dalam penyusunan laporan keuangan yang terbagi atas 4 (empat) bagian berikut:

1. **Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah**, menyajikan informasi tentang organisasi yang ditetapkan sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah.
2. **Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**, menyajikan informasi tentang penerapan kebijakan basis kas atau basis akrual untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penerapan

kebijakan basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban, dan ekuitas dana.

3. **Basis Pengakuan Dan Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**, menyajikan informasi tentang penerapan kebijakan basis pengakuan dan pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan.
4. **Penerapan Kebijakan Akuntansi** Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), menyajikan informasi tentang kebijakan akuntansi yang telah atau belum diterapkan atas pos-pos laporan keuangan sesuai dengan ketentuan SAP.

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

Bab ini menyajikan informasi tentang rincian dan penjelasan pos-pos laporan keuangan yang terbagi atas 2 (dua) bagian yakni:

1. **Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran**, mencakup: pendapatan, belanja, dan surplus/defisit.
2. **Penjelasan atas Pos-pos Neraca**, mencakup: aset, kewajiban dan ekuitas dana.
3. **Penjelasan atas Pos-pos laporan Operasional.**
4. **Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.**

Bab VI Pengungkapan Informasi Lainnya

Bab ini memuat penjelasan tambahan mengenai hal-hal lain yang memerlukan perhatian dan atau belum diinformasikan dalam bab sebelumnya.

Bab VII Penutup

Bab ini merupakan bagian penutup atas catatan laporan keuangan yang menyajikan kesimpulan-kesimpulan penting berkaitan dengan pelaporan keuangan.

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD SKPD

2.1 Ekonomi Makro

Pada mulanya Kabupaten Bengkalis dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 Lembaran Negara Nomor 25 tahun 1956 dengan ibukotanya Bengkalis. Pada tahun 1999 Kota Administratif Dumai meningkat statusnya menjadi Kota Dumai. Pada tahun 2000 terjadi lagi pemekaran, Kabupaten Bengkalis dimekarkan menjadi tiga Kabupaten yaitu Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak dan Kabupaten Rokan Hilir. Pada awal 2009 Kabupaten Bengkalis kembali dimekarkan menjadi Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Pada tahun 2020, Kabupaten Bengkalis terdiri dari 11 Kecamatan yang terletak di daratan dan kepulauan, yaitu: untuk wilayah daratan meliputi Kecamatan Mandau, Kecamatan Pinggir, Kecamatan Bathin Solapan, Kecamatan Talang Muandau, Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Siak Kecil, dan Kecamatan Bandar Laksamana, Sedangkan wilayah kepulauan meliputi Kecamatan Rupert, Kecamatan Rupert Utara, Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan yang terdiri dari 136 desa 19 Kelurahan mengalami kenaikan jika dibandingkan jumlah desa/kelurahan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 08-15 Tahun 2012 yaitu: 155 Desa/Kelurahan. Pada Tahun 2019 Rukun Tetangga Kabupaten Bengkalis mengalami penambahan dari 3021 Rukun Tetangga tahun 2018 menjadi 3034 Rukun Tetangga tahun 2019.

Wilayah Kabupaten Bengkalis terletak pada bagian pesisir Timur Pulau Sumatera antara 207°37,2' - 0055°33,6' Lintang Utara dan 100°57'57,6' - 102°30'25,2' Bujur Timur. Kabupaten Bengkalis memiliki batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Kepulauan Meranti.

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, dan Kota Dumai.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka dan Kabupaten Kep. Meranti.

Wilayah Kabupaten Bengkalis dialiri oleh beberapa sungai. Diantara sungai yang ada di daerah ini yang sangat penting sebagai sarana Perhubungan utama dalam perekonomian penduduk adalah Sungai Siak dengan panjang 300 KM, Sungai Siak Kecil 90 KM dan Sungai Mandau 87 KM.

Luas wilayah Kabupaten Bengkalis 7.773,93 KM², terdiri dari pulau-pulau dan lautan. Tercatat sebanyak 17 pulau utama disamping pulau-pulau kecil lainnya yang berada di wilayah Kabupaten Bengkalis. Wilayah Kabupaten Bengkalis dialiri oleh beberapa sungai. Di antara sungai yang ada di daerah ini yang sangat penting sebagai sarana perhubungan utama dalam perekonomian penduduk adalah Sungai Siak dengan panjang 300 kilometer, Sungai Siak Kecil 90 kilometer dan Sungai Mandau 87 kilometer.

Kabupaten Bengkalis memiliki letak yang sangat strategis, sebab disamping berhadapan langsung dengan Negara tetangga, yakni Malaysia, yang hanya dipisahkan dengan Selat Malaka yang sejak dahulu dikenal sebagai jalur perdagangan Internasional yang ramai, juga berada pada posisi segitiga pertumbuhan Indonesia, Malaysia, Singapura (IMS-GT) dan Segitiga Pertumbuhan Indonesia, Malaysia, Thailand (IMT-GT).

Di samping letaknya yang strategis Kabupaten Bengkalis menyimpan sumber daya alam yang cukup besar bahkan kekayaan alam bumi Bengkalis, baik sektor migas seperti minyak bumi yang terdapat di Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bukit Batu maupun non migas, seperti hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan, dan pariwisata.

Jumlah penduduk Kabupaten Bengkalis, pada tahun 2020 adalah sebesar 573.504 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,88 persen atau lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk pada tahun sebelumnya. Sementara itu, dengan luas wilayah sekitar 8.426,48 KM², Angka kepadatan penduduk menunjukkan rata-rata jumlah

penduduk tiap 1 KM². Semakin besar angka kepadatan penduduk menunjukkan bahwa semakin padat penduduk yang mendiami wilayah tersebut. Kabupaten Bengkalis memiliki kepadatan penduduk sebesar 68 yang menunjukkan terdapat 68 penduduk tiap satu kilometer persegi. Kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi adalah Mandau dimana kecamatan ini merupakan pusat ekonomi dan penduduk Kabupaten Bengkalis. Sedangkan Kecamatan dengan kepadatan terkecil adalah Kecamatan Bandar Laksamana. Secara umum jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Hal ini dapat ditunjukkan oleh rasio jenis kelamin yang nilainya lebih besar dari 100. Pada tahun 2021, untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat 105 penduduk laki-laki.

Pada tahun 2021, realisasi penerimaan daerah Kabupaten Bengkalis tercatat sebesar 4,32 triliun rupiah. Angka ini lebih besar dibanding tahun 2020 yakni sebesar 2,92 triliun. Dari total penerimaan tersebut, komposisi penerimaan terbesar berasal dari dana perimbangan sebesar 3,64 triliun rupiah (84,30 persen). Penerimaan ini mengalami peningkatan dari segi jumlah dan porsi. Sementara terdapat penerimaan PAD sebesar 284,25 miliar rupiah (6,58 persen) dan sumber pendapatan lainnya sebesar 394,46 miliar rupiah (9,13 persen). Sejalan dengan dana perimbangan, kedua penerimaan tersebut mengalami peningkatan secara jumlah dan porsi.

Tingkat perkembangan perekonomian Kabupaten Bengkalis bisa diukur salah satunya dengan angka PDRB. PDRB menggambarkan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. PDRB Kabupaten Bengkalis Bengkalis pada tahun 2021 dengan migas sangat besar mencapai 139,61 triliun rupiah (ADHB). Sementara jika tanpa migas hanya sebesar 73,40 trilliun rupiah.

Dengan besaran PDRB tanpa migas, perekonomian Kabupaten Bengkalis mengalami pertumbuhan sebesar 0,51 persen. Hal ini terjadi karena meningkatnya produksi di sebagian besar lapangan usaha karena pemulihan ekonomi yang terjadi pasca pandemi COVID-19. COVID-19. Selain itu pertumbuhan kategori pertambangan dan penggalian juga tidak mengalami penurunan tidak sedalam tahun sebelumnya. Sama seperti tahun sebelumnya, struktur ekonomi Bengkalis masih didominasi oleh

tiga sektor utama yang sering disebut sebagai leading sector. Posisi pertama leading sector adalah sektor pertambangan dan penggalian (53 persen), diikuti oleh sektor industri pengolahan (21 persen), dan yang ketiga adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (13 persen).

Tabel II.1
Perkembangan PDRB Kabupaten Bengkulu
Tahun 2018 s.d 2020
(Rp milyar)

Sektor	Tahun		
	2019	2020	2021
PDRB ADHB (miliar rupiah)	140.378,91	114.583,70	139.613,18
PDRB ADHK 2010 (miliar rupiah)	76.377,29	73.856,50	74.229,74
PDRB/Kapita ADHB (juta rupiah)	244,99	197,95	243,44
PDRB/Kapita ADHK 2010 (juta rupiah)	133,29	127,46	129,43
Pertumbuhan Ekonomi (%)	-1,89	-3,30	0,51

Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Bengkulu 2022

Sektor pertambangan merupakan salah satu sektor yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian Kabupaten Bengkulu. Sehingga sektor ini merupakan sektor yang paling unggul dan memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap PDRB Kabupaten Bengkulu. Pada tahun 2021, sektor pertambangan minyak dan gas tercatat menyumbang sebesar 82.201,53 miliar rupiah (58,88 persen) dalam PDRB Kabupaten Bengkulu. Angka ini menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 63.512,22 miliar rupiah. Jika dilihat dari segi produksi juga mengalami peningkatan. Sebagai salah satu sumber energi, peran energi listrik adalah sangat penting. Sumbangan sektor listrik terhadap PDRB Kabupaten Bengkulu Tahun 2021 sebesar 43.901,49 juta rupiah. Angka ini meningkat dibandingkan tahun lalu yang sebesar 41.192,81 juta rupiah. Adanya peningkatan ini disebabkan oleh semakin meningkatnya konsumsi listrik yang sejalan dengan bertambahnya pelanggan listrik di Kabupaten Bengkulu.

Sepanjang kurun waktu 2017 sampai 2021 terlihat terlihat adanya kecenderungan aktivitas ekspor dan impor sangat berfluktuasi. Pada tahun 2017-2018 tampak aktivitas ekspor dan impor sempat mengalami penurunan. Namun pada tahun 2019, aktivitas ekspor kembali meningkat

dan diikuti dengan aktivitas impor yang juga meningkat. Nilai Ekspor Bengkalis yang sangat besar terutama disumbangkan oleh adanya komoditas minyak, yaitu bahan bakar mineral. Tercatat pada tahun 2021 ekspor Kabupaten Bengkalis sebesar 862.188 ribu US\$. Negara tujuan utama ekspor Kabupaten Bengkalis adalah negara-negara di Asia seperti Negara Tiongkok 562.601,75 ribu US\$ dimana nilai ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan dibanding tahun sebelumnya. Pada urutan kedua yakni Singapura sebesar 137.009,33 ribu US\$. Selanjutnya Malaysia sebesar 54.483,91 ribu US\$ dan Korea Selatan sebesar 40.879,78 ribu US\$.

Tabel II.2
Perkembangan Ekspor Impor Kabupaten Bengkalis
Tahun 2017 s.d 2021
(dalam US \$)

Tahun	Ekspor	Impor	Ekspor-Impor
(1)	(2)	(3)	(4)=(2 - 3)
2017	290.602,25	286.417,00	4.185,00
2018	168.957,00	165.958,00	2.999,00
2019	249.652,00	247.872,00	1.780,00
2020	399.819,00	398.183,00	1.636,00
2021	862.188,00	860.448,00	1.740,00

Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Bengkalis 2022

2.2 Kebijakan Keuangan

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mewujudkan tujuannya menimbulkan hak dan kewajiban yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan tersebut perlu dikelola secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan pelaksanaan kebijakan fiskal dalam fungsi: *Otorisasi, Perencanaan, Pengawasan, Alokasi, Distribusi, dan Stabilisasi*.

APBD merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. Dengan demikian, APBD mengkoordinasikan

aktivitas belanja pemerintah dan memberi landasan bagi upaya perolehan pendapatan dan pembiayaan oleh pemerintah untuk suatu periode tertentu yang biasanya mencakup periode tahunan.

Dasar penyusunan APBD tersebut didasarkan kepada Rencana Kerja Pemerintahan Daerah atau RKPD (yakni dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun) dan hasil kesepakatan eksekutif dan legislatif terhadap Kebijakan Umum APBD atau KUA (yakni dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun) dan Prioritas dan Plafon Anggaran atau PPA (yakni program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD setelah disepakati dengan DPRD).

Adapun yang menjadi dasar SKPD dalam melaksanakan APBD adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD atau DPA-SKPD (yakni dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran), yang juga berfungsi sebagai landasan pengendalian terhadap pelaksanaan APBD.

Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD tersebut maka entitas akuntansi atau pelaporan diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan kepada sistem akuntansi pemerintahan daerah (yakni serangkaian prosedur yang meliputi proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer).

1) Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Dalam rangka pelaksanaan dan peningkatan pembangunan di Kabupaten Bengkalis, diupayakan pendanaannya secara maksimal melalui usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya peningkatan PAD tersebut dapat ditempuh melalui:

- 📖 Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, penerapan *law enforcement* dalam upaya membangun ketaatan wajib pajak dan wajib retribusi daerah serta peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang dibarengi dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan dengan biaya murah.
- 📖 Mendayagunakan kekayaan daerah yang belum dipisahkan dan belum dimanfaatkan untuk dikelola atau dikerjasamakan pihak ketiga sehingga menghasilkan pendapatan. Penyertaan modal pada pihak ketiga ditetapkan dengan peraturan daerah.

2) Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan untuk belanja daerah meliputi:

- 📖 Belanja Daerah mengacu kepada prioritas pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bengkalis Tahun 2005 s/d 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 s/d 2015 maupun dokumen perencanaan terkait lainnya.
- 📖 Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari *input* yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
- 📖 Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus

terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

- 📖 Kebijakan pengalokasian belanja daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja.
- ☞ Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- ☞ Klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara.
- ☞ Klasifikasi belanja menurut organisasi yang disesuaikan dengan susunan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
- ☞ Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- ☞ Klasifikasi belanja menurut **kelompok belanja** terdiri dari: **1) Belanja Tidak Langsung** yakni belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan; dan **2) Belanja Langsung** yakni belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Kelompok **belanja tidak langsung** dibagi menurut **jenis belanja** yang terdiri dari: belanja pegawai; bunga; subsidi; hibah; bantuan sosial; belanja bagi hasil; bantuan keuangan; dan belanja tidak terduga.

Kelompok **belanja langsung** dibagi menurut **jenis belanja** yang terdiri dari: belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal.

Masing-masing jenis belanja tersebut terbagi atas obyek dan rincian obyek belanja sesuai *nomenklatur* yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 dan Perubahan Tahun No. 21 Tahun 2011.

- 📖 Efisiensi dan efektivitas anggaran yang mengandung arti bahwa dana yang tersedia harus dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk

meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan:

- ☞ Tujuan, sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang ingin dicapai;
- ☞ Penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional.

📖 Meningkatkan keserasian pembangunan di daerah dan percepatan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan upaya-upaya dalam meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi berbagai kegiatan antara pusat dan daerah, antara provinsi dan kabupaten/kota, serta antar daerah, baik pada tataran perencanaan maupun pelaksanaan dan pengendaliannya.

📖 Meningkatkan pengawasan baik melalui pengawasan fungsional maupun pengawasan melekat sehingga dana yang tersedia dalam APBD dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat.

✓ **Program** adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.

☞ Contoh Nama Program:

- Pembangunan Jalan dan Jembatan
- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

✓ **Kegiatan** adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

☞ Contoh Nama Kegiatan:

- Perencanaan Pembangunan Jalan
- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.

✓ **Masukan (*input*)** adalah sumberdaya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut yang diperlukan sebagai bahan masukan untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/ jasa

✓ **Keluaran (*output*)** adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

✓ **Hasil (*outcome*)** adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

✓ **Indikator Kinerja (*performance indicator*)** adalah sesuatu yang akan dihasilkan dari suatu kegiatan berupa barang atau jasa.

☞ Contoh Indikator Kinerja:

- Panjang Jalan.
- Frekuensi Sosialisasi.

3) Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta nomenklatur yang ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 No. 59 Tahun 2007,

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis selaku salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis bertanggungjawab terhadap pelaksanaan APBD untuk pengelolaan urusan wajib otonomi daerah; pemerintahan umum; administrasi keuangan daerah; perangkat daerah; kepegawaian dan urusan wajib persandiaian. Pengelolaan urusan tersebut telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis.

Untuk Tahun Anggaran 2022, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis telah merencanakan untuk melaksanakan 14 (Empat Belas) Program dan 45 (Empat Puluh Lima) Kegiatan dengan anggaran Belanja langsung yang tersedia sebesar Rp. 19.760.149.330,00 atau 81,10% dari keseluruhan anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis sebesar Rp. 24.365.215.290,00.

Hingga 31 Desember tahun anggaran 2022, belanja langsung yang telah terealisasi sebesar Rp. 19.760.149.330,00 atau mencapai 81,10% dari yang dianggarkan sebesar Rp. 24.365.215.290,00 dengan capaian kinerja fisik (output) sebesar 92,49% dengan uraian sebagai berikut:

Tabel II.4
Capaian Target Kinerja APBD Tahun 2022
PER 31 DESEMBER 2022

No	Nama Program	Jumlah Kegiatan	Perbandingan			Capaian Kinerja (%)
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		7.443.906.642,00	5.620.191.905,00	75,50	85,00
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	72.000.000,00	72.000.000,00	100,00	100,00
2.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1	672.000.000,00	668.800.000,00	99,52	100,00
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	229.325.000,00	216.972.000,00	94,61	98,00
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7	1.637.890.820,00	1.550.037.176,00	94,64	91,71
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2	707.326.000,00	671.310.505,00	94,91	98,00
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	549.468.480,00	434.138.089,00	79,01	89,33
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	786.470.000,00	763.963.675,00	97,14	98,33
8.	Pemaduan dan sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kab/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	2	144.452.000,00	122.282.980,00	84,65	85,00
9.	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	2	136.455.200,00	112.011.600,00	82,09	91,50
10.	Pelaksanaan Advokasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	6	1.018.168.200,00	872.535.700,00	85,70	91,00
11.	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	3	2.764.171.800,00	2.589.401.550,00	93,68	96,67
12.	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	6	4.075.667.748,00	3.725.424.449,00	91,41	91,33
13.	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	2	642.378.400,00	476.602.800,00	74,19	83,00
14.	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	6	3.485.535.000,00	1.864.476.901,00	53,49	88,50
	TOTAL	45	24.365.215.290,00	19.760.149.330,00	81,10	92,49

Berdasarkan Tabel II.4 di atas, jika dilakukan perbandingan antara realisasi *input* (dana) sebesar 81,10% dengan keluaran (*output*) yang dihasilkan sebesar 92,49% maka masih menyisakan anggaran belanja sebesar Rp. 4.605.065.960,00 atau 18,90% dari anggaran belanja langsung Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis tahun 2022. Rincian selengkapnya atas capaian target kinerja masing-masing kegiatan sebagaimana disajikan pada **Lampiran I**.

BAB III

IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Berdasarkan kebijakan fiskal yang diterapkan serta kondisi ekonomi Kabupaten Bengkulu secara umum, pencapaian kinerja keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Per 31 Desember Tahun Anggaran 2022 dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

Tabel III.1
Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
PER 31 DESEMBER 2022

No.	Uraian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Di atas/(di bawah) Anggaran	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4-3)	(6)= (5/3)x100%
1	Pendapatan Asli Daerah	0	0	0	0,00
2	Pendapatan Transfer	0	0	0	0,00
3	Lain-lain Pendapatan	0	0	0	0,00
4	Jumlah Pendapatan (1 s/d 3)	0	0	0	0,00
	Belanja Tidak Langsung:	7.443.906.642,00	5.620.191.905,00	(1.823.714.737,00)	(0,24)
5	Belanja Pegawai	7.443.906.642,00	5.620.191.905,00	(1.823.714.737,00)	(0,24)
	Belanja Langsung:	16.921.308.648,00	14.139.957.425,00	(2.781.351.223,00)	(0,16)
6.	Belanja Pegawai	0,00	0,00	(0,00)	(0,0)
7.	Belanja Barang & Jasa	15.549.113.648,00	12.814.092.524,00	(2.735.021.124,00)	(0,18)
8	Belanja Modal	1.372.195.000,00	1.325.864.901,00	(862.835.600,00)	(0,03)
9	Jumlah Belanja (5 s/d 8)	24.365.215.290,00	19.760.149.330,00	(4.605.065.960,00)	(0,81)
	Surplus/(Defisit) (4 - 9)	(24.365.215.290,00)	(19.760.149.330,00)	(4.605.065.960,00)	(0,81)

Lihat Laporan Realisasi Anggaran APBD-Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Tahun 2022 pada halaman muka (on the face) yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Uraian lebih lanjut mengenai realisasi ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja SKPD serta faktor pendorong serta penghambat pencapaian target kinerja sebagaimana diuraikan pada **butir 3.2**.

3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

A. Pendapatan

Seperti yang tersaji dalam **Tabel III.1** di atas, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis selaku salah satu SKPD yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis tidak memiliki kewenangan untuk mengelola anggaran maupun realisasi pendapatan.

B. Belanja

Sesuai dengan kebijaksanaan belanja daerah yang telah ditetapkan, pengendalian belanja yang dilakukan selain melaksanakan efisiensi juga mencegah terjadinya kebocoran-kebocoran serta pemborosan-pemborosan dalam segala sektor pengeluaran melalui pengawasan preventif secara proaktif sehingga seluruh pengeluaran akan mempunyai arti dan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Bengkalis serta dapat dipertanggungjawabkan secara nyata baik fisik, administrasi maupun keuangan.

Realisasi belanja secara keseluruhan masih di bawah anggaran sebagaimana diuraikan berikut ini:

📖 Ditinjau dari **kelompok belanja**:

- ☞ Realisasi Belanja Tidak Langsung yang dipergunakan untuk belanja pegawai sebesar Rp. **5.620.191.905,00** atau 75,50% dari jumlah yang dianggarkan sebesar **Rp. 7.443.906.642,00**.
- ☞ Realisasi Belanja Langsung yang mencakup belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal sebesar Rp. **14.139.957.425,00** atau mencapai 83,56% dari yang dianggarkan sebesar **Rp. 16.921.308.648,00**.

📖 Ditinjau dari **jenis belanja**:

- ☞ Realisasi Belanja Operasi yang mencakup belanja pegawai dan belanja barang dan jasa sebesar Rp. 18.434.284.429,00 atau 80,17% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp. 22.993.020.290,00.
- ☞ Realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 1.325.864.901,00 atau 96,62% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp. 1.372.195.000,00.

Secara umum, keseluruhan program dan kegiatan yang direncanakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis sampai dengan pertengahan Tahun Anggaran 2022 dapat terealisasi dengan baik meskipun terdapat beberapa hambatan yang dihadapi di lapangan, namun tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pencapaian target yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis dapat diselesaikan 100%.

C. Surplus/Defisit

Dari **Tabel III.1** di atas dapat disimpulkan bahwa untuk Tahun Anggaran 2022, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis mengalami defisit sebesar **Rp. (19.760.149.330,00)** atau 24,03% dari jumlah defisit yang dianggarkan sebesar **Rp. (24.365.215.290,00)**.

Kondisi ini menunjukkan bahwa sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran 2022 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis masih menyisakan anggaran sebesar Rp. 4.605.065.960,00 atau 18,90% dari anggarannya.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konversi-konversi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan Akuntansi yang dipergunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2020 ini sebagian besar masih mengacu dan berpedoman kepada:

1. Kebijakan akuntansi yang diatur dalam PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No.1 s.d 11 termasuk Pengantar SAP dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan; Interpretasi PSAP dan Buletin Teknis yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SAP.
2. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual pda pemerintah daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Penggolongan dan Kodefikiasi Barang Milik Daerah.
4. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis yang diatur dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 58 Tahun 2015 tanggal 04 November 2015 yang mencakup Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bengkalis No. 1 sampai dengan No. 21 termasuk Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa hingga saat ini penyusunan kebijakan akuntansi yang bersifat formal dan baku untuk diberlakukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis masih dalam proses sosialisasi.

4.1 Entitas Akuntansi Keuangan Daerah SKPD

Sebagai salah satu entitas akuntansi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 butir 10 dan 26 serta pasal 232 Permendagri No. 13 Tahun 2006 No.59 Tahun 2007 **maupun** pasal 1 butir 12 dan 16 serta pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis telah menyusun Laporan Keuangan Tahun 2020 yang terdiri dari: (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Neraca, (3) Laporan Operasional (4) Laporan Perubahan Ekuitas dan (5) Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode pelaporan 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.

Penyusunan laporan keuangan ini ditujukan dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis untuk Tahun Anggaran 2020 yang berada dalam pengelolaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis.

- ☞ **Entitas Pelaporan** adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- ☞ **Entitas Akuntansi** adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaran yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada Entitas Pelaporan.
- ☞ **Pengguna Anggaran** adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- ☞ **Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)** adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari sekretaris daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan, dan satuan polisi pamong praja sesuai dengan kebutuhan daerah.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Basis akuntansi yang digunakan adalah basis cash untuk pengakuan unsur pendapatan LRA, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan **basis akrual** (*accrual basis*) untuk pengakuan unsur Pendapatan LO, Beban, Pembiayaan LO, aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas,

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas akuntansi dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas akuntansi. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa unsur aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan

pemerintah, tanpa memperhatikan saat terjadinya kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3 Basis Pengakuan dan Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Laporan keuangan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang, agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Pengukuran pada masing-masing pos laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis sebagai berikut:

4.3.1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Daerah.

Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan *azas bruto*, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto (sebelum dikompensasikan dengan pengeluaran).

Akuntansi pendapatan disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintahan.

1) Pendapatan LRA

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah Kab. Bengkalis, dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan LRA diakui pada saat

1. Diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
2. Diterima oleh SKPD
3. Diterima oleh entitas lain di luar Pemerintahan Daerah lain atas nama BUD yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pengembalian yang sifatnya normal (sistemik) dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih yaitu pada akun SILPA pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

2) Pendapatan LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Kab. Bengkalis yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan meskipun belum diterima aliran kasnya.

Pendapatan-LO diakui pada saat:

- a. Pemerintah Kab. Bengkalis memiliki hak atas pendapatan.
- b. Pemerintah Kab. Bengkalis menerima kas yang berasal dari pendapatan atau pendapatan terealisasi.

Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih, misalnya:

- a. Timbulnya hak untuk menagih Pendapatan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Retribusi Parkir berdasarkan audit dari Kantor Akuntan Publik Independen.
- b. Timbulnya hak untuk menagih Pendapatan Pajak Reklame, Retribusi, IMB, dan HO langsung ditetapkan didepan.

Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh Pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan. Pengakuan LO dapat terjadi di PPKD dan SKPD.

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan LO. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak

berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan LO dibukukan sebagai pengurang pendapatan LO pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

4.3.2. Kebijakan Akuntansi Belanja dan Beban

1. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah,

Belanja diakui pada saat:

- a. Terjadinya pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum daerah atau pemerintah daerah lainnya setelah dilakukan pengesahan definitive oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD.
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Pengguna Anggaran (PA) setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD.
- c. Dalam hal Badan Layan Umum, Belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Belanja diukur dan dicatat sebesar jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

2. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dana, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban diakui pada saat:

- a. Timbulnya kewajiban
- b. Terjadinya konsumsi asset
- c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa.

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi asset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi asset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.

Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai asset sehubungan dengan penggunaan asset bersangkutan/berlaluanya waktu. Contoh adalah penyusutan atau amortisasi.

Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Pengakuan beban pada SKPD terdiri dari:

1. Beban Pegawai

Dalam mekanisme UP/GU/TU, beban pegawai diakui ketika bukti pembayaran beban telah diverifikasi oleh PPK dan disahkan PA/KPA. Sedangkan dalam mekanisme LS Beban pegawai diakui ketika daftar gaji telah terbit dan diterima oleh PPK.

2. Beban Barang dan Jasa

Dalam mekanisme UP/GU/TU, beban barang dan jasa diakui ketika bukti pembayaran beban kepada pihak ketiga atau bukti transaksi telah diverifikasi oleh PPK dan disahkan oleh PA/KPA.

Sedangkan dalam mekanisme LS, beban barang dan jasa diakui ketika Berita Acara (BA) yang mengindikasikan telah diterimanya barang oleh SKPD atau telah selesainya jasa yang dilakukan oleh Pihak Ketiga diterima oleh Panitia Penerima Barang SKPD/Dinas.

Khusus untuk beban persediaan, digunakan metode pendekatan aset, artinya setiap pembelian persediaan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah/SKPD langsung akan menambah aset yaitu pada akun persediaan. Metode pencatatan persediaan yaitu metode perpetual, yang menuntut dilakukannya pemutakhiran setiap terjadi perubahan posisi akun persediaan.

Beban Penyusutan menggunakan metode garis lurus.

4.3.3. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kab. Bengkalis, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Kab. Bengkalis terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan Pembiayaan adalah Semua penerimaan rekening Kas Umum Daerah yang berasal dari: penerimaan pinjaman, penjualan obligasi Pemerintah Kab. Bengkalis, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

Pengeluaran Pembiayaan adalah Semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain: Pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal Pemerintah Kab. Bengkalis, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima/dikeluarkan pada Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pemerintah Daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan asas bruto.

Akuntansi pembiayaan netto adalah Selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurang pengeluaran pembiayaan dalam

periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih atau kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama 1 (satu) periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Netto.

Sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama 1 (satu) periode pelaporan. Selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama 1 (satu) periode pelaporan dicatat dalam Pos Silpa atau Sikpa.

4.3.4. Kebijakan Akuntansi Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

a) Aset Lancar

Aset Lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu) periode akuntansi. Aset lancar terdiri dari:

(1) Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah, yang terdiri dari:

- ☞ Kas di Bendaharawan Penerima mencakup seluruh kas yang berada di bawah tanggung jawab bendaharawan penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan dari bendaharawan penerimaan yang bersangkutan.
- ☞ Kas di Bendaharawan Pengeluaran adalah merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh bendaharawan pengeluaran yang berasal dari sisa uang

muka kerja yang belum disetorkankan kembali ke Kas Daerah per tanggal neraca.

☞ Dikonsolidasikan (yakni ke perkiraan Rekening Koran Bendaharawan Umum Daerah).

Keseluruhan perkiraan (*account*) ini disajikan sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya.

(2) Panjar/Uang Muka

Akun atau perkiraan (*account*) ini dipergunakan untuk mencatat pengeluaran yang telah dilakukan namun imbal jasa atau prestasi atas pengeluaran tersebut belum diterima. Panjar akan dicatat sebagai belanja pada Laporan Realisasi Anggaran bilamana imbal jasa atau prestasi telah diterima. Perkiraan ini disajikan sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasinya

(3) Piutang Pajak Daerah

Akun atau perkiraan (*account*) ini merupakan piutang yang diakui atas Pajak Hotel dan Restoran serta Pajak Daerah lainnya yang sudah ada ketetapannya melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak/Surat Ketetapan Pajak Tambahan (SKP/SKPT), tetapi belum dilakukan penyetoran. Perkiraan ini disajikan sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasinya.

(4) Piutang Retribusi Daerah

Akun ini merupakan piutang yang diakui atas Retribusi Daerah yang sudah ada ketetapannya melalui penerbitan Surat Ketetapan Retribusi/Surat Ketetapan Retribusi Tambahan (SKR/SKRT), tetapi belum dilakukan penyetoran. Akun ini disajikan sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasinya.

(5) Piutang Lain-lain

Akun ini merupakan piutang di luar piutang pajak dan retribusi daerah. Perkiraan ini disajikan sebesar nilai nominal.

(6) Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berwujud:

- ☞ Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
- ☞ Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
- ☞ Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- ☞ Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Pengakuan terhadap persediaan:

- ☞ Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- ☞ Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.
- ☞ Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik.
- ☞ Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan asset untuk Konstruksi Dalam Pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan.

Persediaan disajikan sebesar:

- ☞ Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- ☞ Harga Pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- ☞ Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

c. Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset Tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari seluruh/sebagian APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan aset tetap terdiri dari harga belinya atau kontruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat didistribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut ke kondisi yang bias dimanfaatkan atau bekerja. Apabila penilaian aset dengan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

(1) Klasifikasi aset tetap sebagai berikut:

i. Tanah

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Tanah pertama kali diakui sebesar biaya perolehan, yaitu mencakup biaya pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan, jalan dan irigasi, dan jaringan yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut atau dimaksudkan untuk dimusnahkan.

ii. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya

signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Biaya perolehan peralatan dan mesin meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

iii. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan, antara lain meliputi: bangunan gedung, monumen, bangunan menara, dan rambu-rambu. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris dan Pajak.

iv. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan, yang antara lain meliputi: jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi, dan jaringan. Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam akun tanah.

Biaya perolehan aset jalan, irigasi dan jaringan meliputi, biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai aset tersebut siap pakai/digunakan.

v. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan

operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga.

vi. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya.

Akun ini dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun. Apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahterimakan, akun ini akan direklasifikasi menjadi aset tetap.

(2) Pengukuran Aset Tetap

- Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- Pengukuran dan penyajian Aset Tetap dalam Neraca pada umumnya berasal dari klasifikasi kepada Belanja Modal tanpa memperhatikan batasan nilai minimal kapitalisasi (*capitalization treshold*) mengingat hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Bengkalis belum menetapkan kebijakan akuntansi mengenai batasan nilai minimal kapitalisasi.
- Seluruh aset tetap tersebut hingga saat ini belum dilakukan penghitungan penyusutan baik dalam hal penyajian pada neraca maupun pengakuan beban.
- Biaya pemeliharaan dan perbaikan Aset Tetap (Belanja Pemeliharaan) yang telah ditetapkan dalam kelompok belanja operasi pada APBD tidak dikapitalisasi tetapi langsung dibukukan sebagai biaya; sedangkan untuk pemugaran/rehab total dan penambahan aset tetap yang nilainya material dan dikelompokkan dalam belanja

modal pada APBD dikapitalisasi dengan menambah nilai perolehan aset tetap yang bersangkutan. Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- ☞ Pemeliharaan dan perbaikan umumnya bertujuan untuk menjaga atau mengembalikan kondisi aset tetap agar dapat dimanfaatkan secara normal.
 - ☞ Pemugaran/rehab total bertujuan untuk menambah umur atau memperpanjang masa manfaat aset tetap.
 - ☞ Penambahan bertujuan untuk menambah kapasitas atau memperbesar manfaat aset tetap yang bersangkutan.
- Penambahan aset tetap sebagian besar berasal dari transaksi belanja modal yang berasal dari APBD Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Aset Tetap yang dicatat dalam Neraca ini merupakan aset tetap yang memenuhi kriteria aset tetap sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yakni:
- ☞ merupakan aset yang memiliki sifat berwujud (*tangible asset*);
 - ☞ mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - ☞ biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - ☞ tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - ☞ diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Berdasarkan kriteria tersebut, maka aset tetap yang dilaporkan dalam Neraca merupakan aset tetap yang **hak penguasaan dan/atau hak kepemilikannya** berada pada SKPD cq. Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Kabupaten Bengkalis ataupun dimanfaatkan oleh masyarakat umum maupun entitas lainnya.

- Aset akan dihapusbukukan apabila rusak, usang, hilang dan sebagainya berdasarkan Surat Keputusan (SK) Penghapusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d) Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar maupun aset tetap.

4.3.5. Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak yang terjadi di masa lalu. Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Penyajian utang pemerintah di neraca diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Utang dicatat sebesar nilai nominal. Pada setiap tanggal neraca, utang dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

a) Klasifikasi Kewajiban

(1) Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban ini mencakup utang yang berasal dari pinjaman (bagian lancar utang jangka panjang dan utang kepada pihak ketiga), utang bunga, utang perhitungan pihak ketiga (PFK), serta utang jangka pendek lainnya.

i. Rekening Koran (keluar) Bendaharawan Umum Daerah (R/K (K) BUD atau Uang Muka dari BUD)

Merupakan akun untuk menampung transaksi belanja yang berasal dari uang yang diperoleh SKPD dari

Bendaharawan Umum Daerah. Akun ini akan dicatat di sebelah kredit untuk transaksi belanja dengan pembayaran langsung/SPM-LS maupun untuk pengisian kas SKPD melalui penerbitan SPM-UP, SPM-GU maupun SPM-TU. Pada akhir tahun, perkiraan ini akan ditutup dan saldonya akan dipindahkan ke bagian Ekuitas Dana untuk Dikonsolidasikan (yakni ke perkiraan Rekening Koran Bendahrawan Umum Daerah).

ii. Pendapatan yang Ditangguhkan

Merupakan akun sementara untuk menampung kas yang diterima Bendaharawan Penerimaan (di catat di sisi kredit) maupun yang disetorkan oleh Bendaharawan Penerima ke Kas Daerah (di catat di sisi debet). Akun ini juga dipergunakan untuk mencatat pengakuan atas terjadinya piutang atas pendapatan.

iii. Utang kepada Pihak Ketiga (*accounts payable*)

Utang kepada Pihak Ketiga berasal dari kontrak atau perolehan barang/jasa yang belum dibayar sampai dengan tanggal neraca awal.

Apabila pihak ketiga/rekanan membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, kemungkinan terdapat realisasi pekerjaan yang telah diserahterimakan tetapi belum dibayar penuh oleh pemerintah sampai tanggal neraca. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar jumlah yang belum dibayar untuk barang tersebut pada tanggal neraca.

iv. Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

PFK merupakan utang yang timbul akibat pemerintah belum menyetor kepada pihak lain atas pungutan/potong PFK dari Surat Perintah Membayar (SPM) atau dokumen lain yang dilakukannya.

Nilai yang dicantumkan di neraca untuk akun ini adalah sebesar saldo pungutan/potong yang belum disetorkan kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca.

v. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang jangka pendek lainnya merupakan utang selain bagian lancar utang jangka panjang, utang kepada pihak ketiga (*account payable*), utang perhitungan pihak ketiga (PFK), utang bunga, dan uang muka dari Kas Umum Daerah.

(2) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban ini mencakup utang yang berasal dari pinjaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri dan dari penerbitan sekuritas pemerintah.

b) Pengakuan dan Pengukuran Kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

4.3.6. Kebijakan Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.

Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi

1. Kapitalisasi Belanja Menjadi Aset Tetap

Kapitalisasi adalah Penentuan nilai buku terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.

Pengeluaran-pengeluaran dalam rangka perolehan asset merupakan belanja modal apabila memenuhi semua kriteria berikut:

- a. Pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang yang manfaat ekonominya lebih dari satu periode akuntansi (lebih dari 12 bulan);
- b. Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan;
- c. Barang tersebut dibeli dengan tujuan tidak untuk dijual; dan
- d. Barang yang dibeli tersebut pada waktu penggunaannya akan membutuhkan belanja pemeliharaan.

Pengeluaran-pengeluaran setelah perolehan merupakan belanja modal apabila memenuhi semua kriteria berikut:

- a. Pengeluaran-pengeluaran yang akan menambah efisiensi;
- b. Pengeluaran-pengeluaran yang memperpanjang umur aset;
- c. Pengeluaran-pengeluaran yang meningkatkan kapasitas atau mutu produksi;
- d. Jumlah pengeluaran melebihi batasan minimal jumlah biaya yang dikapitalisasi sebagaimana telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

2. Penyusutan Aset Tetap

Suatu aset disebut sebagai aset tetap adalah karena manfaatnya dapat dinikmati lebih dari 12 bulan atau 1 periode akuntansi. Kapasitas atau manfaat suatu aset tetap semakin lama semakin menurun karena digunakan dalam kegiatan operasi pemerintah dan sejalan dengan itu maka nilai aset tetap tersebut juga

semakin menurun.

Metode Penyusutan adalah Penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset serta bukan alokasi biaya. Metode Penyusutan yang digunakan Pemerintah Kabupaten Bengkalis adalah metode Garis Lurus dengan rumus:

$$\text{Penyusutan Per Periode} = \frac{\text{Nilai Perolehan / Penilaian}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Adapun masa manfaat atau umur ekonomis sesuai daftar kelompok asset tetap dan masa manfaatnya yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan biaya penyusutan asset tetap, **diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penerapan Masa Manfaat Aset Tetap di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.**

BAB V
PENJELASAN POS-POS
LAPORAN KEUANGAN

5.1 Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1 Pendapatan **Rp 0.00**

Akun ini untuk menunjukkan jumlah penerimaan yang bersumber dan diperoleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis. Hingga saat ini, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis bukan merupakan salah satu SKPD yang mengelola pendapatan daerah.

5.1.2 Belanja Operasi **Rp 18.434.284.429,00**

Jumlah tersebut merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis untuk membiayai kegiatan operasi penyelenggaraan pemerintah selama satu Tahun Anggaran 2022 sebesar 80,17% dari anggarannya sebesar Rp. 22.993.020.290,00 yang terdiri dari:

➤ Belanja Pegawai	Rp 5.620.191.905,00
➤ Belanja Barang dan Jasa	Rp 12.814.092.524,00
Jumlah	Rp 18.434.284.429,00

Belanja Pegawai sebesar Rp. 5.620.191.905,00 atau 75,50% dari anggaran sebesar Rp. 7.443.906.642,00 yang terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja barang dan jasa dengan rincian sebagai berikut:

➤ Gaji dan Tunjangan:	Rp. 2.789.736.295,00
▪ Gaji Pokok PNS	Rp 2.070.943.834,00
▪ Belanja Tunjangan Keluarga ASN	Rp 172.057.670,00
▪ Belanja Tunjangan Jabatan ASN	Rp 111.405.000,00
▪ Belanja Tunj Fungsional ASN	Rp 63.314.980,00

▪ Belanja Tunjangan Fung Umum ASN	Rp	70.697.000,00
▪ Belanja Tunjangan Beras ASN	Rp	107.905.800,00
▪ Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	Rp	9.059.686,00
▪ Belanja Pembulatan Gaji ASN	Rp	27.271,00
▪ Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	Rp	167.093.423,00
▪ Belanja Iuran Jaminan Kecelakaa Kerja PNS	Rp	4.307.904,00
▪ Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	Rp	12.923.727,00
➤ Belanja Tambahan Penghasilan ASN:	Rp	2.512.705.610,00
Berdasarkan Beban Kerja	Rp	1.079.821.219,00
Berdasarkan kondisi kerja	Rp	0,00
Berdasarkan prestasi kerja	Rp	1.432.884.391,00
Berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	Rp	317.750.000,00
Jumlah	Rp	5.620.191.905,00

Adapun Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 12.814.092.524,00 atau 82,41% dari anggaran sebesar Rp. 15.549.113.648,00 yang dipergunakan untuk membiayai belanja sebagai berikut:

➤ Belanja Bahan Pakai Habis	Rp	2.023.766.323,00
➤ Belanja Bahan/Material	Rp	0,00
➤ Belanja Jasa Kantor	Rp	3.778.889.410,00
➤ Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	Rp	0,00
➤ Belanja Cetak dan Penggandaan	Rp	0,00
➤ Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/Parkir	Rp	42.800.000,00
➤ Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	Rp	12.000.000,00
➤ Belanja Sewa Perlalatan & Mesin	Rp	15.090.000,00
➤ Belanja Makanan dan Minuman	Rp	0,00
➤ Belanja Pakaian Kerja	Rp	0,00
➤ Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	Rp	10.358.280,00
➤ Belanja Perjalanan Dinas	Rp	3.552.583.911,00
➤ Belanja pemeliharaan	Rp	1.305.401.475,00

➤ Belanja Kursus, Pelatihan, sosialisasi & Bimbingan teknis PNS	Rp	449.201.000,00
➤ Honorarium PNS	Rp	0,00
➤ Honorarium Non PNS	Rp	0,00
➤ Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Rp	1.624.002.125,00
Jumlah	Rp	12.814.092.524,00

5.1.3 Belanja Modal

Rp 1.325.864.901,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran 2022 untuk memperoleh aset tetap yang digunakan untuk keperluan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah ataupun untuk dimanfaatkan masyarakat umum yaitu 1.325.864.901,00 atau 96,62% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp. 1.372.195.000,00 yang terdiri dari:

➤ Tanah	Rp	0,00
➤ Peralatan dan Mesin	Rp	575.429.905,00
➤ Gedung dan Bangunan	Rp	750.434.996,00
➤ Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	,00
➤ Aset Tetap Lainnya	Rp	0,00
Jumlah	Rp	1.325.864.901,00

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, realisasi Belanja Modal Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis sebesar Rp. 1.325.864.901,00.

Adapun rincian realisasi Belanja Modal sebagai berikut:

- ❖ **Belanja Modal peralatan dan mesin** sebesar Rp. **575.429.905,00** yang di akui menjadi aset sebesar Rp. 523.653.905,00, tidak masuk kapitalisasi aset sebesar Rp. 21.838.000,00, dan masuk ke kategori aset gedung dan bangunan sebesar Rp. 29.938.000,00.

- ❖ **Belanja Modal Gedung dan Bangunan** sebesar Rp. 750.434.996,00 yang diakui menjadi aset sebesar Rp. 409.615.496,00, tidak masuk kapitalisasi aset gedung dan bangunan sebesar Rp. 106.093.500,00, dan masuk ke kategori peralatan dan mesin sebesar Rp. 234.726.000,00.

5.1.4 Surplus/(Defisit) Rp (19.760.149.330,00)

Jumlah tersebut merupakan defisit anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis 31 Desember 2022. Total realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp. (19.760.149.330,00) atau 81,10% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp. (24.365.215.290,00). Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis tidak mengelola pendapatan daerah.

Dengan demikian, terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 4.605.065.960,00 atau 18,90 % dari jumlah defisit yang dianggarkan sebesar Rp. (24.365.215.290).

5.2 Laporan Operasional

5.2.1 Pendapatan LO Rp 612.046.950,00

Akun ini untuk menunjukkan jumlah penerimaan yang bersumber dan diperoleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis.

Pendapatan LO adalah Hak Pemerintah daerah yang diakui di akui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Hingga saat ini, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis bukan merupakan salah satu SOPD yang mengelola pendapatan daerah. Laporan Operasional menyajikan pos-pos Pendapatan LO, Beban, surplus/defisit dari kegiatan Operasional. Pendapatan LO Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis berasal dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat BKKBN Provinsi Riau sebesar Rp. 612.046.950,00 berupa alat-alat kontrasepsi. Adapun Berita Acara Penerimaan Hibah terlampir pada **Lampiran II**.

5.2.2 Beban Pegawai **Rp 5.620.191.905,00**

Jumlah tersebut merupakan *pengeluaran yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis* untuk membiayai kegiatan operasi penyelenggaraan pemerintah per 31 Desember Tahun Anggaran 2022 yang terdiri dari:

➤ Gaji dan Tunjangan:	Rp.	2.789.736.295,00
▪ Gaji Pokok PNS	Rp	2.070.943.834,00
▪ Belanja Tunjangan Keluarga ASN	Rp	172.057.670,00
▪ Belanja Tunjangan Jabatan ASN	Rp	111.405.000,00
▪ Belanja Tunj Fungsional ASN	Rp	63.314.980,00
▪ Belanja Tunj Fungsional Umum ASN	Rp	70.697.000,00
▪ Belanja Tunjangan Ecras ASN		107.905.800,00
▪ Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	Rp	9.059.686,00
▪ Beban Pembulatan Gaji ASN	Rp	27.271,00
▪ Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	Rp	167.093.423,00
▪ Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	Rp	4.307.904,00
▪ Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	Rp	12.923.727,00
➤ Belanja Tambahan Penghasilan ASN:	Rp	2.512.705.610,00
Berdasarkan Beban Kerja	Rp	1.079.821.219,00
Berdasarkan kondisi kerja	Rp	0,00
Berdasarkan prestasi kerja	Rp	1.432.884.391,00
Berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	Rp	317.750.000,00
Jumlah	Rp	5.620.191.905,00

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu

5.2.3 Beban Barang **Rp 2.822.763.793,50**

Jumlah tersebut merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu untuk membiayai kegiatan operasi penyelenggaraan pemerintah per 31 Desember Tahun Anggaran 2022.

Adapun rincian beban tersebut adalah sebagai berikut:

❖ Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	Rp.	14.650.000,00
❖ Beban Bahan-Bahan Kimia	Rp.	0,00
❖ Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp.	0,00
❖ Beban Bahan-Bahan Lainnya	Rp.	11.680.000,00
❖ Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	Rp.	15.000.000,00
❖ Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp.	166.966.600,00
❖ Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp.	0,00
❖ Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp.	301.408.300,00
❖ Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp.	10.487.000,00
❖ Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	Rp.	1.370.000,00
❖ Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp.	2.000.000,00
❖ Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Rp.	0,00
❖ Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp.	33.442.000,00
❖ Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	Rp.	8.900.000,00
❖ Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp.	591.702.600,00
❖ Beban Obat-Obatan-Obat	Rp.	829.932.070,50
❖ Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	Rp.	60.946.223,00
❖ Beban Makanan dan Minuman Rapat	Rp.	239.770.000,00
❖ Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp.	380.734.000,00
❖ Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	Rp.	48.250.000,00
❖ Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Rp.	105.525.000,00

5.2.4 Beban Jasa **Rp 4.308.530.022,00**

Jumlah tersebut merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu

untuk membiayai kegiatan operasi penyelenggaraan pemerintah per 31 Desember Tahun Anggaran 2022 yang terdiri dari:

• Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp.	280.800.000,00
• Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp.	218.850.000,00
• Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	Rp.	986.200.000,00
• Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	Rp.	3.000.000,00
• Beban Jasa Tenaga Administrasi	Rp.	157.200.000,00
• Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	Rp.	80.200.000,00
• Beban Jasa Tenaga Kebersihan	Rp.	230.700.000,00
• Beban Jasa Tenaga Keamanan	Rp.	668.800.000,00
• Beban Jasa Tenaga Supir	Rp.	96.000.000,00
• Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	Rp.	7.500.000,00
• Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	Rp.	112.800.000,00
• Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	Rp.	56.275.000,00
• Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Rp.	50.000.000,00
• Beban Tagihan Telepon	Rp.	0,00
• Beban Tagihan Air	Rp.	2.177.500,00
• Beban Tagihan Listrik	Rp.	152.885.321,00
• Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	Rp.	31.900.000,00
• Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Rp.	634.778.921,00
• Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Rp.	9.014.000,00
• Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp.	4.383.546,00
• Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp.	5.974.734,00
• Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp.	9.000.000,00
• Beban Sewa Alat Penguji Kendaraan Bermotor	Rp.	840.000,00
• Beban Sewa Mebel	Rp.	3.750.000,00
• Beban Sewa Peralatan Studio Audio	Rp.	1.500.000,00
• Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Rp.	35.800.000,00
• Beban Sewa Bangunan Terbuka	Rp.	7.000.000,00
• Beban Sewa Alat Musik	Rp.	12.000.000,00
• Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	Rp.	0,00
• Beban Bimbingan Teknis	Rp.	449.201.000,00

5.2.5 Beban Pemeliharaan Rp 437.100.245,74

Jumlah tersebut merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis

untuk membiayai kegiatan operasi penyelenggaraan pemerintah per 31 Desember Tahun Anggaran 2022 yang terdiri dari:

➤ Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp	409.109.675,00
➤ Beban Pemeliharaan Gedung & Bangunan	Rp	27.990.570,74

5.2.6 Beban Perjalanan Dinas **Rp 3.552.583.911,00**

JUMLAH **Rp 437.100.245,74**

Jumlah tersebut merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis untuk membiayai kegiatan operasi penyelenggaraan pemerintah per 31 Desember Tahun Anggaran 2022 yang terdiri dari:

➤ Beban Perjalanan Dinas Biasa	Rp	888.624.593,00
➤ Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp	2.663.959.318,00

JUMLAH **Rp 3.552.583.911,00**

5.2.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi **Rp 840.403.850,67**

Jumlah tersebut merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis untuk membiayai kegiatan operasi penyelenggaraan per 31 Desember Tahun Anggaran 2022 yang terdiri dari:

➤ Beban penyusutan peralatan dan mesin	Rp	629.596.239,00
➤ Beban penyusutan gedung dan bangunan	Rp	202.578.445,00
➤ Beban penyusutan Aset Tetap Lainnya - Buku	Rp	0,00
➤ Beban Amortisasi Aset tak berwujud	Rp	8.229.166,67

JUMLAH **Rp 840.403.850,67**

5.2.8 Beban Lain-lain **Rp 1.624.002.125,00**

Jumlah tersebut merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis

untuk membiayai kegiatan operasi penyelenggaraan pemerintah per 31 Desember Tahun Anggaran 2022 yang terdiri dari:

➤ Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Rp	57.500.000,00
➤ Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Rp	1.566.502.125,00
JUMLAH	Rp	1.624.002.125,00

5.2.9 Beban Hibah **Rp 21.838.000,00**

Realisasi Beban Hibah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis sebesar Rp. 21.838.000,00 merupakan belanja modal peralatan dan mesin berupa Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya Minilaporatomi Set/Tubektomi Set sebesar Rp. 18.000.000,00 dan VTP KIT sebesar Rp. 3.838.000,00 yang kemudian diserahkan kepada pihak ketiga (Puskesmas Kec. Bengkalis). BAST terlampir pada **Lampiran XI**.

5.3 Laporan Perubahan Ekuitas

5.3.1 Ekuitas Awal **Rp 6.920.057.794,42**

Jumlah tersebut merupakan jumlah ekuitas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sampai dengan tahun 2022 yang dijadikan sebagai total ekuitas awal untuk tahun anggaran 2022.

5.3.2 Kenaikan/ Penurunan Ekuitas **Rp (1.144.782.427,09)**

Jumlah tersebut merupakan nilai yang mempengaruhi turunnya ekuitas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sampai dengan 31 Desember 2022. Hal ini dipengaruhi oleh Surplus Defisit LO sebesar Rp. (18.615.366.902,91), RK-PPKD sebesar Rp. 19.760.149.330,00.

5.3.3 Ekuitas Akhir **Rp 8.064.840.221,51**

Jumlah tersebut merupakan jumlah ekuitas akhir Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana per 31 Desember Tahun Anggaran 2022.

5.4 Neraca

5.4.1 Kas di Bendaharawan Penerimaan Rp 0.00

Akun ini untuk menunjukkan saldo kas yang berada di bawah tanggung jawab Bendaharawan Penerimaan SKPD yang bersumber dari pengelolaan pendapatan asli daerah per tanggal 31 Desember 2022. Hingga saat ini, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis tidak termasuk sebagai salah satu SKPD yang mengelola PAD.

5.4.2 Kas di Bendaharawan Pengeluaran Rp 0,00

Jumlah ini merupakan saldo kas per tanggal per 31 Desember Tahun Anggaran 2022 yang menjadi tanggung jawab pengelolaan Bendaharawan Pengeluaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis yang berasal dari sisa *dropping* Bendaharawan Umum Daerah (BUD) Kabupaten Bengkalis setelah dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan per 31 Desember Tahun Anggaran 2022.

5.4.3 Piutang Pajak Daerah Rp 0.00

Akun ini menunjukkan saldo Piutang Pajak Daerah yang sudah ada ketetapannya, namun sampai dengan tanggal per 31 Desember Tahun Anggaran 2022 belum dibayar oleh wajib pajak/wajib setor. Hingga saat ini, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis tidak termasuk sebagai salah satu SKPD yang mengelola pajak daerah.

5.4.4 Piutang Retribusi Daerah Rp 0.00

Akun ini untuk menunjukkan saldo Piutang Retribusi Daerah yang sudah ada ketetapannya, namun sampai dengan tanggal per 31 Desember Tahun Anggaran 2022 belum dibayar oleh wajib pajak/wajib setor. Hingga saat ini, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis tidak termasuk sebagai salah satu SKPD yang mengelola retribusi daerah.

5.4.5 Panjar / Uang Muka Rp 0.00

Jumlah tersebut merupakan jumlah panjar/uang muka yang diberikan oleh Bendaharawan Pengeluaran SKPD kepada para PPTK (Pejabat

Pelaksana Teknis Kegiatan) dan pegawai di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis maupun pihak ketiga lainnya Per 31 Desember 2022.

Panjar tersebut dipergunakan untuk membiayai terlebih dahulu pelaksanaan kegiatan ataupun pembayaran lainnya dan akan dipertanggungjawabkan pada saat panjar tersebut dipergunakan untuk merealisasikan belanja yang telah dianggarkan.

5.4.6 Persediaan **Rp 126.459.496,25**

Akun ini menunjukkan saldo persediaan per tanggal per 31 Desember Tahun Anggaran 2022 yang berada dalam pengelolaan Bendaharawan Barang Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis. Saldo pada rekening ini merupakan saldo persediaan barang yang mempunyai kriteria habis pakai, kurang dari 12 bulan dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 58 Tahun 2014 bahwa metode pencatatan persediaan yang digunakan adalah metode fisik, sedangkan metode penilaian yang digunakan adalah metode FIFO (First In First Out).

Akun ini akan menunjukkan saldo persediaan per tanggal per 31 Desember Tahun Anggaran 2022 yang berada dalam pengelolaan Pengurus Barang Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Saldo Persediaan per 31 Desember Tahun Anggaran 2022 dijelaskan pada tabel berikut ini.

Tabel V.1
Saldo Persediaan Per 31 Desember Tahun Anggaran 2022

No.	Jenis Persediaan	Per 31 Desember Tahun Anggaran 2022 (Rp.)
1.	Alat Tulis Kantor	1.188.000,00
2.	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	75.000,00
3.	Bahan Cetak	266.000,00
4.	Benda Pos	110.000,00
5.	Alat Listrik	632.000,00
6.	Bahan Lainnya	53.000,00
7.	Obat/Kontrasepsi	124.135.496,25

Rincian Persediaan sebesar Rp. 126.459.496,25 tersebut selengkapnya dapat dilihat pada **Lampiran III**.

5.4.7 Aset Tetap **Rp 14.378.548.690,97**

Akun ini menunjukkan jumlah Aset Tetap (sebelum penyusutan) yang tercatat dan dikelola langsung oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis per 31 Desember Tahun Anggaran 2022 yakni sebesar Rp. 14.378.548.690,97 yang seluruhnya Aset Tetap Rampung yang siap/telah dipergunakan dengan rincian sebagai berikut:

➤ Tanah	Rp	373.525.000,00
➤ Peralatan dan Mesin	Rp	6.645.269.815,12
➤ Gedung dan Bangunan	Rp	7.324.534.075,85
➤ Jalan, Irigasi, dan Instalasi	Rp	0,00
➤ Aset Tetap Lainnya	Rp	35.219.800,00
Jumlah Aset Tetap		Rp 14.378.548.690,97

Secara ringkas saldo aset tetap per 31 Desember Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 14.378.548.690,97 sebagaimana disajikan pada **Tabel V.2** dengan uraian penjelasan sebagai berikut:

Tabel V.2
Rincian Aset Tetap per 31 Desember Tahun Anggaran 2022

No.	Kelompok Aset Tetap	Saldo per 01-01-2022	Mutasi Aset Tetap 2022		Saldo per 31-12-2022
			Penambahan	Pengurangan	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	Tanah	373.525.000,00	0,00	0,00	373.525.000,00
2.	Peralatan dan Mesin	5.550.493.513,74	1.094.776.301,38	0,00	6.645.269.815,12
3.	Gedung dan Bangunan	6.246.982.246,97	1.077.551.828,88	0,00	7.324.534.075,85
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Aset Tetap Lainnya	35.219.800,00	0,00	0,00	35.219.800,00
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	12.206.220.560,71	2.172.328.130,26	(0,00)	14.378.548.690,97

Dari **Tabel V.2** di atas, nilai aset per 31 Desember Tahun 2022 sebesar Rp. 14.378.548.690,97 adalah jumlah dari nilai aset

(sebelum penyusutan) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Rincian mutasi aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp. **1.094.776.301,38** sebesar berikut:

- Belanja Modal Peralatan Mesin sebesar Rp. 575.429.905,00 yang diakui menjadi Aset sebesar Rp. **523.653.905,00**, dikeluarkan dari aset Peralatan dan Mesin sebab diserahkan kepada pihak ketiga sebesar Rp. 21.838.000,00.
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan masuk kategori Peralatan dan Mesin Rp. **234.726.000,00**;
- Belanja Jasa jadi Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp. **336.396.396,38**.

Adapun rincian penambahan aset gedung dan bangunan sebesar Rp. **1.077.551.828,88** sebagai berikut:

- Belanja Modal Gedung Bangunan sebesar Rp. 750.434.996,00 yang masuk menjadi aset hanya sebesar Rp. **409.615.496,00**;
- Belanja Jasa jadi Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp. **637.998.332,88**;
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin masuk kategori Gedung dan Bangunan sebesar Rp. **29.938.000,00**.

Rincian selengkapnya mutasi Aset Tetap tersebut dapat dilihat pada **Lampiran VI** untuk mutasi Aset Tetap rampung dan Rincian Aset serta Perhitungan Harga Perolehan.

5.4.8 Akumulasi Penyusutan **Rp. (6.429.033.272,71)**

Jumlah Akumulasi penyusutan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 dapat dirincikan sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	31 Desember 2022
▶ Peralatan Mesin	(5.133.471.839,71)
▶ Gedung dan bangunan	(1.295.561.433,00)
▶ Jalan, Irigasi, dan Instalasi	(0,00)
▶ Aset Tetap Lainnya	(0,00)
JUMLAH	(6.429.033.272,71)

Penghitungan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dapat dilihat pada **Lampiran VII.**

5.4.9 Aset Lainnya Rp **39.500.000,00**

Jumlah asset lainnya sebesar Rp. 39.500.000,00 dari pembelian website yang pengadaannya pada bulan November 2018.

Rincian Rekapitulasi mutasi Aset Lainnya dapat dilihat pada **Lampiran VIII.**

5.4.10 Amortisasi Aset Lainnya Rp **(39.500.000,00)**

Jumlah tersebut merupakan amortisasi dari aset tak berwujud yang pengadaannya pada bulan November 2018. Rincian Amortisasi Aset Lainnya dapat dilihat pada **Lampiran IX.**

5.4.11 Perhitungan Pihak Ketiga (FPK) Rp **0.00**

Jumlah tersebut merupakan utang yang timbul atas pajak-pajak yang telah dipungut oleh Bendaharawan Pengeluaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis selaku salah satu Wajib Pungut (WAPU) atas transaksi pengeluaran yang terjadi, namun sampai dengan tanggal per 31 Desember Tahun Anggaran 2022 belum disetorkan ke Kas Daerah/Negara. Sesuai ketentuan, penyetoran tersebut akan dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

5.4.12 Utang kepada Pihak Ketiga Rp **0.00**

Jumlah tersebut merupakan jumlah kewajiban/hutang yang harus dibayar Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Bengkalis kepada rekanan/peniaja barang atau jasa per 31 Desember Tahun Anggaran 2022 . Kewajiban tersebut timbul karena adanya prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh SKPD tetapi SKPD belum memenuhi kewajiban pembayaran kepada rekanan yang bersangkutan.

5.4.13 Utang Jangka Pendek **Rp** **11.134.693,00**

Jumlah tersebut merupakan jumlah kewajiban/hutang jangka pendek lainnya yang harus dibayar Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis kepada pegawai atau pihak lainnya per 31 Desember Tahun Anggaran 2022, antara lain:

▶ Utang telepon	Rp	0,00
▶ Utang air	Rp	143.500,00
▶ Utang Listrik	Rp	9.984.143,00
▶ Utang Fax/Internet	Rp	1.007.050,00

JUMLAH **Rp** **11.134.693,00**

Adapun rincian dan Bukti Utang Jangka Pendek Lainnya dapat dilihat pada **Lampiran X**.

5.4.14 Ekuitas **Rp** **8.064.840.221,51**

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

BAB VI

PENGUNGKAPAN INFORMASI LAINNYA

Beberapa hal lain yang perlu diungkap dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2022 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Per 31 Desember Tahun 2022 sebagaimana diuraikan berikut ini:

1) Status dan kedudukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis.

Beberapa informasi lain yang berkaitan dengan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis sebagaimana diuraikan berikut ini :

- a) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu SOPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis
- b) Sesuai dengan Peraturan Daerah di atas, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis adalah unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang **Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kedudukan ini telah sejalan dengan nomenklatur yang telah ditetapkan dalam Permendagri No.13 Tahun 2006 jo. No. 21 Tahun 2011 yaitu sebagai organisasi yang bertanggungjawab dalam pengelolaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/ Kota yakni **Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar; point h) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.**
- c) Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian

Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis maka tugas pokok Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

d) Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis mempunyai fungsi sebagai berikut :

- ☞ Perumusan kebijakan daerah di bidang pengendalian penduduk penyuluhan dan penggerakan, keluarga berencana, dan kesejahteraan keluarga
- ☞ Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian penduduk penyuluhan dan penggerakan, keluarga berencana, dan kesejahteraan keluarga
- ☞ Pelaksanaan koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang pengendalian penduduk penyuluhan dan penggerakan, keluarga berencana, dan kesejahteraan keluarga
- ☞ Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pengendalian penduduk penyuluhan dan penggerakan, keluarga berencana, dan kesejahteraan keluarga
- ☞ Pemantuan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang pengendalian penduduk penyuluhan dan penggerakan, keluarga berencana, dan kesejahteraan keluarga
- ☞ Pelaksanaan administrasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan
- ☞ Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

e) Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis terdiri dari:

- ☞ Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas;
- ☞ Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris;
- ☞ Unsur Pelaksana adalah Bidang.

- f) Adapun susunan organisasi terdiri dari:
- ☞ Kepala;
 - ☞ Sekretaris;
 - ☞ Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
 - ☞ Bidang Keluarga Berencana
 - ☞ Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
 - ☞ Unit Pelaksana Teknis
 - ☞ Kelompok Jabatan Fungsional.
- g) Tempat kedudukan/domisili Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis bertempat di Jl. Hang Tuah No.08 – Bengkalis.
- h) Terhitung sejak tanggal 30 Maret 2022, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis dipimpin oleh **HAMBALI, S.Pd.I** selaku Kepala Dinas menggantikan kedudukan oleh **IMAM SUBCHI, SKM, M.Si** berdasarkan Surat Perintah Bupati Bengkalis Nomor: Kpts. 821.22/BKPP/01/2022 tanggal 30 Maret 2022 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

2) Penyusunan kebijakan akuntansi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bengkalis masih dalam proses sosialisasi.

Kebijakan Akuntansi yang dipergunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2022 ini sebagian besar masih mengacu dan berpedoman kepada kebijakan akuntansi yang diatur dalam PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Buletin Teknis SAP dan praktik-praktik yang selama ini dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Kondisi ini dikarenakan pedoman kebijakan akuntansi yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis hingga saat ini masih dalam proses sosialisasi.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis akan segera menerapkannya setelah kebijakan akuntansi tersebut selesai disusun dan ditetapkan secara formal melalui Peraturan Kepala Daerah.

3) Penjelasan Tambahan atas Penyajian Nilai Aset Tetap

Penyajian nilai Aset Tetap dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2022 merupakan perolehan aset tetap yang berasal dari APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2022.

4) Pemberlakuan SOTK baru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis No. 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis.

BAB VII PENUTUP

Sebagai bagian terakhir dari Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Tahun 2022, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- 📖 Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu No. 66 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu.
- 📖 Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu selaku salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu bertanggungjawab terhadap pelaksanaan APBD untuk pengelolaan urusan wajib otonomi daerah; pemerintahan umum; administrasi keuangan daerah; perangkat daerah; kepegawaian dan urusan wajib persandiaan
- 📖 Penyusunan Laporan Keuangan ini ditujukan sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan APBD Kabupaten Bengkulu Tahun 2022 yang dialokasikan kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu.
- 📖 Untuk Tahun Anggaran 2022, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu telah merencanakan untuk melaksanakan 14 (Empat Belas) Program dan 45 (Empat Puluh Lima) Kegiatan dengan anggaran Belanja langsung yang tersedia sebesar Rp. 19.760.149.330,00 atau 81,10% dari keseluruhan anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu sebesar Rp. 24.365.215.290,00.
- 📖 Hingga 31 Desember tahun anggaran 2022, belanja langsung yang telah terealisasi sebesar Rp. 19.760.149.330,00 atau mencapai 81,10% dari yang dianggarkan sebesar Rp. 19.760.149.330,00 dengan capaian kinerja fisik (output) sebesar 92,49%.
- 📖 Secara umum program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu sebagaimana yang telah

ditetapkan dalam APBD Kabupaten Bengkalis sampai dengan Tahun 2022 dapat dicapai dengan capaian atas target kinerja tersebut mencapai 92,49%.

Realisasi Defisit per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. (19.760.149.330,00) yang berarti mencapai 81,10% dari yang dianggarkan dalam APBD TA 2022 sebesar Rp. (24.365.215.290,00). Kondisi ini menunjukkan bahwa sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran 2022 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis masih menyisakan anggaran sebesar Rp. 4.605.065.960,00 atau 18,90% dari anggarannya.

Seluruh capaian kinerja sebagaimana yang disimpulkan di atas menunjukkan adanya komitmen penuh dari pimpinan beserta dukungan segenap staf dan pegawai di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Bengkalis Tahun 2022, di samping adanya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi (*KISS*) dengan berbagai pihak terkait maupun adanya partisipasi dari segenap lapisan unsur masyarakat.

Dengan segala keterbatasan yang ada, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berupaya untuk menjaga keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah (yakni APBD), sebelum laporan keuangan ini disampaikan dan dipergunakan pihak-pihak terkait. Penyusunan laporan keuangan ini masih belum sempurna, Oleh karena saran dan masukan dari berbagai pihak guna penyempurnaan di masa mendatang sangat diharapkan.

Akhir kata, semoga Laporan Keuangan Per 31 Desember 2022 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan memberikan informasi secara transparan kepada para *stakeholders* sehingga dapat memberikan umpan balik (*feed back*) dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis pada khususnya dan Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada umumnya di masa mendatang.

Bengkalis, Februari 2023



DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BENGKALIS

LAMPIRAN
LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2022

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
CAPAIAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Nama Program dan Kegiatan	Anggaran APBD				Realisasi				Perbandingan Anggaran & Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
		B. Pegawai (Rp)	B. Barang & Jasa (Rp)	B. Modal (Rp)	Jumlah (Rp) = (3 + 4 + 5)	B. Pegawai (Rp)	B. Barang & Jasa (Rp)	B. Modal (Rp)	Jumlah (Rp) = (7 + 8 + 9)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (7 + 8 + 9)	(11) = (10 / 6) * 100	(12)
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.443.906.642,00			7.443.906.642,00	5.620.191.905,00			5.620.191.905,00	75,50	85,00
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00	72.000.000,00	0,00	72.000.000,00	0,00	72.000.000,00	0,00	72.000.000,00	100,00	100,00
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		72.000.000,00		72.000.000,00		72.000.000,00		72.000.000,00	100,00	100,00
II	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		672.000.000,00	0,00	672.000.000,00	0,00	668.800.000,00	0,00	668.800.000,00	99,52	100,00
2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		672.000.000,00		672.000.000,00		668.800.000,00		668.800.000,00	99,52	100,00
III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,00	229.325.000,00	0,00	229.325.000,00	0,00	216.972.000,00	0,00	216.972.000,00	94,61	98,00
3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		229.325.000,00		229.325.000,00		216.972.000,00		216.972.000,00	94,61	98,00
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	0,00	1.614.598.820,00	23.292.000,00	1.637.890.820,00	0,00	1.526.769.776,00	23.267.400,00	1.550.037.176,00	94,64	91,71
4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		62.500.000,00		62.500.000,00		33.010.000,00		33.010.000,00	52,82	75,00
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		172.738.420,00		172.738.420,00		172.537.800,00		172.537.800,00	99,88	100,00
6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		211.415.000,00		211.415.000,00		211.385.000,00		211.385.000,00	99,99	100,00
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		194.620.400,00		194.620.400,00		148.311.900,00		148.311.900,00	76,21	87,00
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		41.160.000,00		41.160.000,00		31.900.000,00		31.900.000,00	77,50	80,00
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		694.015.000,00		694.015.000,00		693.215.076,00		693.215.076,00	99,88	100,00
10	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		238.150.000,00	23.292.000,00	261.442.000,00		236.410.000,00	23.267.400,00	259.677.400,00	99,33	100,00
V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	453.000,00	706.873.000,00	707.326.000,00	0,00	0,00	671.310.505,00	671.310.505,00	94,91	98,00
11	Pengadaan Mebel			101.600.000,00	101.600.000,00		0,00	101.222.000,00	101.222.000,00	99,63	100,00
12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		453.000,00	605.273.000,00	605.726.000,00		0,00	570.088.505,00	570.088.505,00	94,12	96,00
VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		549.468.480,00	0,00	549.468.480,00	0,00	434.138.089,00	0,00	434.138.089,00	79,01	89,33
13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		171.120.000,00		171.120.000,00		164.895.000,00		164.895.000,00	96,36	98,00
14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		271.488.000,00		271.488.000,00		162.884.809,00		162.884.809,00	60,00	70,00
15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		106.860.480,00		106.860.480,00		106.358.280,00		106.358.280,00	99,53	100,00
VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		686.470.000,00	100.000.000,00	786.470.000,00	0,00	664.363.675,00	99.600.000,00	763.963.675,00	97,14	98,33

LAMPIRAN I

16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		352.310.000,00		352.310.000,00		330.203.675,00		330.203.675,00	93,73	95,00
17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		230.400.000,00		230.400.000,00		230.400.000,00		230.400.000,00	100,00	100,00
18	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		103.760.000,00	100.000.000,00	203.760.000,00		103.760.000,00	99.600.000,00	203.360.000,00	99,80	100,00
VIII	Pemaduan dan sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kab/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	0,00	144.452.000,00	0,00	144.452.000,00	0,00	122.282.980,00	0,00	122.282.980,00	84,65	85,00
19	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)		40.342.000,00		40.342.000,00		31.840.980,00		31.840.980,00	78,93	85,00
20	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal		104.110.000,00	0,00	104.110.000,00		90.442.000,00	0,00	90.442.000,00	86,87	90,00
IX	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kab/ kota	0,00	136.455.200,00	0,00	136.455.200,00	0,00	112.011.600,00	0,00	112.011.600,00	82,09	91,50
21	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga		15.420.000,00	0,00	15.420.000,00		14.803.200,00	0,00	14.803.200,00	96,00	98,00
22	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB		121.035.200,00	0,00	121.035.200,00		97.208.400,00	0,00	97.208.400,00	80,31	85,00
X	Pelaksanaan advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	0,00	1.018.168.200,00	0,00	1.018.168.200,00	0,00	872.535.700,00	0,00	872.535.700,00	85,70	91,00
23	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja		4.375.000,00	0,00	4.375.000,00		4.375.000,00		4.375.000,00	100,00	100,00
24	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal		280.901.000,00		280.901.000,00		271.944.800,00		271.944.800,00	96,81	98,00
25	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang		70.640.000,00		70.640.000,00		68.000.000,00		68.000.000,00	96,26	98,00
26	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (RakorDes), dan Mini Lokakarya (Minilok)		306.900.000,00		306.900.000,00	0,00	214.350.000,00		214.350.000,00	69,84	75,00
27	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK		283.500.000,00		283.500.000,00		262.135.700,00		262.135.700,00	92,46	95,00
28	Pengendalian Program KKBPK		71.852.200,00		71.852.200,00		51.730.200,00		51.730.200,00	72,00	80,00
XI	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB (PKB/PLKB)	0,00	2.764.171.800,00	0,00	2.764.171.800,00	0,00	2.589.401.550,00	0,00	2.589.401.550,00	93,68	96,67
29	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB		100.194.200,00		100.194.200,00		93.520.200,00		93.520.200,00	93,34	95,00
30	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK		1.919.977.600,00	0,00	1.919.977.600,00		1.754.761.350,00	0,00	1.754.761.350,00	91,39	95,00
31	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		744.000.000,00		744.000.000,00		741.120.000,00		741.120.000,00	99,61	100,00

LAMPIRAN I

XII	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di daerah Kab/ kota	0,00	3.533.637.748,00	542.030.000,00	4.075.667.748,00	0,00	3.193.737.453,00	531.686.996,00	3.725.424.449,00	91,41	91,33
32	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		256.498.648,00		256.498.648,00		223.961.405,00		223.961.405,00	87,31	90,00
33	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		1.145.419.100,00		1.145.419.100,00		870.046.698,00		870.046.698,00	75,96	80,00
34	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB		1.695.370.000,00	542.030.000,00	2.237.400.000,00		1.691.545.250,00	531.686.996,00	2.223.232.246,00	99,37	100,00
35	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya		49.600.000,00		49.600.000,00		45.290.000,00		45.290.000,00	91,31	95,00
36	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan		46.750.000,00		46.750.000,00		37.141.000,00		37.141.000,00	79,45	85,00
37	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi		340.000.000,00		340.000.000,00		325.753.100,00		325.753.100,00	95,81	98,00
XIII	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB	0,00	642.378.400,00	0,00	642.378.400,00	0,00	476.602.800,00	0,00	476.602.800,00	74,19	83,00
38	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB		541.350.000,00		541.350.000,00		389.478.400,00		389.478.400,00	71,95	76,00
39	Pembinaan Terpadu Kampung KB		101.028.400,00		101.028.400,00		87.124.400,00		87.124.400,00	86,24	90,00
XIV	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	0,00	3.485.535.000,00	0,00	3.485.535.000,00	0,00	1.864.476.901,00	0,00	1.864.476.901,00	53,49	88,50
40	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB), (BKR), (PIK-R) (BKL), (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga		130.552.000,00		130.552.000,00		121.836.000,00		121.836.000,00	93,32	98,00
41	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		136.180.000,00		136.180.000,00		135.804.800,00		135.804.800,00	99,72	100,00
42	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		241.365.000,00		241.365.000,00		224.389.700,00		224.389.700,00	92,97	95,00
43	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		2.536.670.000,00		2.536.670.000,00		992.649.901,00		992.649.901,00	39,13	50,00
44	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		193.985.200,00		193.985.200,00		189.149.000,00		189.149.000,00	97,51	98,00

LAMPI											
45	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)		246.782.800,00		246.782.800,00		200.647.500,00		200.647.500,00	81,31	90,00
	J U M L A H	7.443.906.642,00	15.549.113.648,00	1.372.195.000,00	24.365.215.290,00	5.620.191.905,00	12.814.092.524,00	1.325.864.901,00	19.760.149.330,00	81,10	92,49

Bengkalis, Februari 2023

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BENGKALIS



PERHITUNGAN ALAT KONTRASEPSI DARI BKKBN PROVINSI RIAU

NO	Tgl	Nama Barang	Banyaknya	Harga	TOTAL
1	Jumat, 04 Februari 2022	IUD Copper T	100	12.500,00	1.250.000,00
		Gestin F3, 1 cc	201	11.210,00	2.253.210,00
		Gestin F3, 1 cc	2799	11.210,00	31.376.790,00
		Pil KB	3000	1.153,00	3.459.000,00
		Lidocain, 2% Injeksi Ampul			-
		JUMLAH			38.339.000,00
2	Jumat, 11 Maret 2022				-
		Lidocain, 2% Injeksi Ampul	300	1.086,00	325.800,00
		JUMLAH			325.800,00
3	Senin, 21 Maret 2022	Pil KB	2700	1.153,00	3.113.100,00
		Implant	510	179.050,00	91.315.500,00
		Gestin F3, 1 cc	800	11.210,00	8.968.000,00
		Asam Mefanamat 500 mg, Tablet	5000	280,00	1.400.000,00
		Lidocain, 2% Injeksi Ampul	500	1.086,00	543.000,00
		Kain Penutup Operasi steril (Doek Steril Disposable)	500	7.206,00	3.603.000,00
		Safety box	5	20.680,00	103.400,00
		Sarung tangan steril	100	10.702,00	1.070.200,00
		Sarung tangan steril	300	10.783,00	3.234.900,00
		Sarung tangan steril	100	10.702,00	1.070.200,00
		Masker (Face mask)	500	1.200,00	600.000,00
		Povidone Iodine, 30 ml	50	3.520,00	176.000,00
		Plaster Steril Dermafix	500	4.212,00	2.106.000,00
		Alcohol Swab 2-ply	500	116,00	58.000,00
				JUMLAH	
4	Jumat, 03 Juni 2022	IUD Copper T	300	12.500,00	3.750.000,00
		Implant	600	150.015,00	90.009.000,00
		Suntikan, 1 cc	15000	4.825,00	72.375.000,00
		Pil KB	3000	1.153,00	3.459.000,00
		Pil KB	1800	1.153,00	2.075.400,00
		Pil KB	200	1.153,00	230.600,00
		syringe , 3 ml (Implant)	9600	818,00	7.852.800,00
		Asam Mefanamat 500 mg, Tablet	5000	310,00	1.550.000,00
		Plaster Steril Dermafix	600	4.212,00	2.527.200,00
		Alcohol Swab 2-ply	600	116,00	69.600,00
		JUMLAH			183.898.600,00
Kamis, 08 September 2022		Implant	200	157.485,00	31.497.000,00
		Kain Penutup Operasi steril (Doek Steril Disposable)	200	6.863,00	1.372.600,00
		Lidocain, 2% Injeksi Ampul	200	891,00	178.200,00
		Masker (Face mask)	200	860,00	172.000,00
		Sarung tangan steril	200	6.780,00	1.356.000,00
		Povidone Iodine, 30 ml	40	3.885,00	155.400,00
		Plaster Steril Dermafix	200	4.212,00	842.400,00
		JUMLAH			35.573.600,00
Kamis, 06 Oktober 2022		Implant	700	157.485,00	110.239.500,00
		Lidocain, 2% Injeksi Ampul	700	891,00	623.700,00
		Masker (Face mask)	600	860,00	516.000,00
		Sarung tangan steril	650	6.780,00	4.407.000,00
		JUMLAH			115.786.200,00
Kamis, 10 November 2022		Implant	500	157.485,00	78.742.500,00
		IUD Copper T	200	12.500,00	2.500.000,00
		Masker (Face mask)	500	860,00	430.000,00

LAMPIRAN II

	Lidocain, 2% Injeksi Ampul	500	891,00	445.500,00
	Sarung tangan steril	500	6.780,00	3.390.000,00
	Povidone Iodine, 30 ml	100	3.885,00	388.500,00
	Alcohol Swab 2-ply	500	116,00	58.000,00
	Plaster Steril Dermafix	500	4.212,00	2.106.000,00
	Kain Penutup Operasi steril (Doek Steril Disposable)	500	6.863,00	3.431.500,00
	JUMLAH			91.492.000,00
Selasa, 20 Desember 2022	Mini Pil	1000	4.017,00	4.017.000,00
	Implant	150	157.485,00	23.622.750,00
	Lidocain, 2% Injeksi Ampul	100	891,00	89.100,00
	Plaster Steril Dermafix	100	4.212,00	421.200,00
	Sarung tangan steril	150	6.780,00	1.017.000,00
	Masker (Face mask)	100	860,00	86.000,00
	Alcohol Swab 2-ply	150	116,00	17.400,00
	JUMLAH			29.270.450,00
TOTAL SEMESTER I				612.046.950,00
TOTAL				612.046.950,00

SURAT BUKTI BARANG KELUAR

NOMOR : 008/SBBK/DAR-BKKBNRIAU/II/2022

TANGGAL : 04/02/2022

KEPADA : *gudang_dppkb_bengkalis*
 ALAMAT : *Jl. Hang Tuah No. 08 Bengkalis*
 KODE GUDANG :

Untuk Keperluan: Distribusi rutin
 Distribusi non rutin (permintaan darurat atau lainnya)

BERDASARKAN SPMB NOMOR : 004/SPMB/DAR-KBKR/II/2022 TANGGAL : 04/02/2022
 METODE PENGIRIMAN : Dikirim Diambil Pihak Ketiga

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN	SPESIFIKASI		HARGA		SUMBER DANA	JITIK PERMINTAAN DARURAT TERKINI	JITIK STOK REALOKASI TERKINI
				NOMOR BEIS	BATAS KADALUWARSA	HARGA SATUAN	TOTAL NILAI BARANG			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (3)x(7)	(9)	(10)	(11)
1	IUD Coper T	100	Buah	DAS2374	31/01/2027	12.500,00	1.250.000,00	APBN		
2	Gestin F3, 1 cc	201	Vial	0131007	05/04/2023	11.210,00	2.253.210,00	APBN		
3	Gestin F3, 1 cc	2.799	Vial	0131006	05/04/2023	11.210,00	31.376.790,00	APBN		
4	PIL KB	3.000	Siklus	0193105	22/09/2025	1.153,00	3.459.000,00	APBN		
5	Lidocaine, 2 persen, Injeksi, ampul	500	Buah	20ID014A	30/04/2022	1.149,00	574.500,00	APBN		
TOTAL NILAI BARANG							38.913.500,00			

30 379.000

Yang mengeluarkan
Bendahara Materiiil

(Andika Tri Saputra)
Pangkat: Pengatur (II/C)
NIP 19750105 200812 1 001

Yang mengangkut
Mengambil /mengantar

(Andika Tri Saputra)
Pangkat: Pengatur (II/C)
NIP 19750105 200812 1 001

Yang menerima

Nama: APLIKASTUTI
Pangkat: PENATA III/c
NIP 19750424 200212 2 004

Catatan:

- Harga satuan yang dicantumkan adalah harga satuan pada saat penerimaan terakhir

**BERITA ACARA
PENYERAHAN DAN PENERIMAAN
BARANG PERSEDIAAN
ALAT/OBAT KONTRASEPSI DAN NON KONTRASEPSI**

Nomor : 0440/SP.03.06/J.I/2022

Pada hari ini Rabu tanggal sembilan bulan Februari tahun dua ribu dua puluh dua kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Arselan Syarif, SE
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk. I (III/b)
NIP : 19840720 201012 1 002
Jabatan : Sub Koordinator Subbag Keuangan BMN
Perwakilan BKKBN Provinsi Riau
Alamat : Jalan Terubuk No.1 Pekanbaru

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Perwakilan BKKBN Propinsi Riau yang selanjutnya dalam Berita Acara ini disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Apikastuti
Pangkat/Golongan : Penata (III/c)
NIP : 19750424 200212 2 004
Jabatan : Pengurus barang Gudang alat dan obat Kontrasepsi (Alokon)
Alamat : Jalan Hangtuh No., Bengkalis

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jabatan tersebut di atas yang selanjutnya dalam Berita Acara ini disebut **PIHAK KEDUA**, dengan mengingat :

1. Surat Permintaan akan Alat/Obat Kontrasepsi dan Non Kontrasepsi dari DPP & KB Kabupaten Bengkalis Nomor : 476/DPPKB/KB/1/2022/08 Tanggal : 19 Januari 2022
2. Berdasarkan SPMB Nomor : 004/SPMB/DAR-KBKR/II/2022 Tanggal : 04 Februari 2022
3. Berdasarkan SBBK Nomor : 008/SBBK/DAR-BKKBNRIAU/II/2022 Tanggal : 04 Februari 2022

Telah melaksanakan penyerahan dan penerimaan barang Persediaan Alat/Obat Kontrasepsi dan Non Kontrasepsi dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

- a. **PIHAK PERTAMA** menyerahkan barang persediaan alat/obat kontrasepsi dan non kontrasepsi kepada **PIHAK KEDUA**.
- b. **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK PERTAMA** barang persediaan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 ;

Pasal 2

Penyerahan barang persediaan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 butir a selain menggunakan Berita Acara ini juga tetap menggunakan Surat Bukti Barang Keluar (SBBK).

Pasal 3

PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas penguasaan, penggunaan dan administrasi serta kewenangan pengelolaan barang persediaan sebagaimana tersebut Pasal 1 butir a yang diserahkan **PIHAK PERTAMA** menjadi tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4

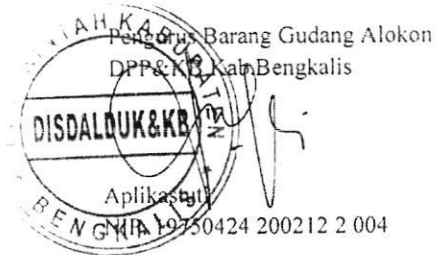
Berita Acara yang telah ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan dilampiri SBBK, oleh **PIHAK PERTAMA** dapat digunakan sebagai dasar untuk menghapuskan dari daftar barang persediaan Kuasa Pengguna Barang.

Pasal 5

Demikian penyerahan dan penerimaan Barang Persediaan Alat/Obat Kontrasepsi dan Non Kontrasepsi ini dilaksanakan dengan sebenarnya dihadapan para Saksi sebagaimana diakhir Berita Acara ini.

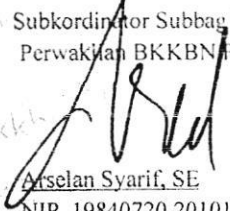
Pekanbaru, 08 Februari 2022

PIHAK KEDUA :



PIHAK PERTAMA

Subkordinator Subbag Keuangan BMN
Perwakilan BKKBN Provinsi Riau.


Arselan Syarif, SE
NIP. 19840720 201012 1 002

SURAT BUKTI BARANG KELUAR

NOMOR : 013/SBBK/DAR-KBKR/III/2022

TANGGAL : 11/03/2022

KEPADA : *gudang_dppkb_bengkalis*
 ALAMAT : *Jl. Hang Tuah No. 08 Bengkalis*
 KODE GUDANG :


Untuk Keperluan: Distribusi rutin
 Distribusi non rutin (permintaan darurat atau lainnya)

BERDASARKAN SPMB NOMOR : 009/SPMB/DAR-KBKR/III/2022 TANGGAL : 11/03/2022
 METODE PENGIRIMAN : Dikirim Diambil Pihak Ketiga

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN	SPESIFIKASI		HARGA		SUMBER DANA	TITIK PERMINTAAN DARURAT TERKINI	TITIK STOK REALOKASI TERKINI
				NOMOR BETS	BATAS KADALWARSA	HARGA SATUAN	TOTAL NILAI BARANG			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (3)x(7)	(9)	(10)	(11)
1	Lidocaine, 2 persen. Injeksi. ampul	300	Buah	26362067	30/09/2023	1.086,00	325.800,00	APBN		
TOTAL NILAI BARANG							325.800,00			

PEKANBARU 11 MARET 2022

Yang mengeluarkan
Bendahara Materil



(Andika Tri Saputra)
Pangkat: Pengatur (II/C)
NIP 19750105 200812 1 001

Yang mengangkut
Mengambil /mengantar



(Aplikastuti)
Pangkat: Penata III/c
NIP 19750424 200212 2 004

Yang menerima



(Aplikastuti)
Pangkat: PENATA III/C
NIP 19750424 200212 2 004

Catatan:

Harga satuan yang dicantumkan adalah harga satuan pada saat penerimaan terakhir

**BERITA ACARA
PENYERAHAN DAN PENERIMAAN
BARANG PERSEDIAAN
ALAT/OBAT KONTRASEPSI DAN NON KONTRASEPSI**

Nomor : 0708/SP.03.06/J.I/2022

Pada hari ini Jumat tanggal sebelas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Arselan Syarif,SE
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk.I (III/b)
NIP : 19840720 201012 1 002
Jabatan : Sub Koordinator Subbag Keuangan BMN
Perwakilan BKKBN Provinsi Riau
Alamat : Jalan Terubuk No.1 Pekanbaru

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Perwakilan BKKBN Propinsi Riau yang selanjutnya dalam Berita Acara ini disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Aplikastuti
Pangkat/Golongan : Penata (III/c)
NIP : 19750424 200212 2 004
Jabatan : Pengurus barang Gudang alat dan obat Kontrasepsi (Alokon)
Alamat : Jalan Hangtuah No.. Bengkalis

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jabatan tersebut di atas yang selanjutnya dalam Berita Acara ini disebut **PIHAK KEDUA**, dengan mengingat :

1. Surat Permintaan akan Alat/Obat Kontrasepsi dan Non Kontrasepsi dari DPP & KB Kabupaten Bengkalis Nomor : 476/DPPKB/KB/III/2022/54 Tanggal : 11 Maret 2022
2. Berdasarkan SPMB Nomor : 009/SPMB/DAR-KBKR/III/2022 Tanggal : 11 Maret 2022
3. Berdasarkan SBBK Nomor : 013/SBBK/DAR-BKKBNRIAU/III/2022 Tanggal : 11 Maret 2022

Telah melaksanakan penyerahan dan penerimaan barang Persediaan Alat Obat Kontrasepsi dan Non Kontrasepsi dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

- a. **PIHAK PERTAMA** menyerahkan barang persediaan alat/obat kontrasepsi dan non kontrasepsi kepada **PIHAK KEDUA**.
- b. **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK PERTAMA** barang persediaan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 ;

Pasal 2

Penyerahan barang persediaan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 butir a selain menggunakan Berita Acara ini juga tetap menggunakan Surat Bukti Barang Keluar (SBBK).

Pasal 3

PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas penguasaan, penggunaan dan administrasi serta kewenangan pengelolaan barang persediaan sebagaimana tersebut Pasal 1 butir a yang diserahkan **PIHAK PERTAMA** menjadi tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4

Berita Acara yang telah ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan dilampiri SBBK, oleh **PIHAK PERTAMA** dapat digunakan sebagai dasar untuk menghapuskan dari daftar barang persediaan Kuasa Pengguna Barang.

Pasal 5

Demikian penyerahan dan penerimaan Barang Persediaan Alat/Obat Kontrasepsi dan Non Kontrasepsi ini dilaksanakan dengan sebenarnya dihadapan para Saksi sebagaimana diakhir Berita Acara ini.

Pekanbaru, 11 Maret 2022

PIHAK KEDUA :



PIHAK PERTAMA

Subkordinator Subbag Keuangan BMN
Perwakilan BKKBN Provinsi Riau.

Arselan Syarif, SE
NIP. 19840720 201012 1 002



Gudang BKKBN RIAU
 Jl. Terubuk No. 1 Pekanbaru 28125

SURAT BUKTI BARANG KELUAR

NOMOR : 016 SBBK/DAR-BKKBN/RIAU/III/2022

TANGGAL : 21 03 2022

KEPADA : *gudang_dppkb_bengkalis*
 ALAMAT : *Jl. Hang Tuah No. 08 Bengkalis*
 KODE GUDANG :

Untuk Keperluan: Distribusi rutin
 Distribusi non rutin (permintaan darurat atau lainnya)

BERDASARKAN SPMB NOMOR : 002/SPMB/RUT-KBKR/III/2022 TANGGAL : 21 03 2022
 METODE PENGIRIMAN : Dikirim Diambil Pihak Ketiga

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN	SPESIFIKASI		HARGA		SUMBER DANA	TITIK PERMINTAAN DARURAT TERKINI	STOK REALOKAS TERKINI
				NOMOR BENS	BATAS KADALUWARSA	HARGA SATUAN	TOTAL NILAI BARANG			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (3)x(7)	(9)	(10)	(11)
1 ✓	PII: KB	2.700	Siklus	0193105	22/09/2025	1.153,00	3.113.100,00	APBD	1754	9352
2 ✓	Implant	510	Set	91715106	30/09/2024	179.050,00	91.315.500,00	APBD	212	1128
3 ✓	Geslin F3, 1 cc	800	Vial	0131007	05/04/2023	11.210,00	8.968.000,00	APBN		
4 ✓	Asam Mefenamat, 500 mg, Tablet	5.000	Buah	HTMECA05320	30/09/2022	280,00	1.400.000,00	APBN		
5 ✓	Lidocaine, 2 persen, Injeksi, ampul	500	Buah	26362067	30/09/2023	1.086,00	543.000,00	APBN		
6 ✓	Kain penutup operasi steril (Dock Steril Disposable)	500	Buah	17072088	30/06/2025	7.206,00	3.603.000,00	APBN		
7 ✓	Safety box	5	Buah	2013/077	14/03/2050	20.680,00	103.400,00	APBN		
8 ✓	Sarung tangan steril	100	Pasang	2007478504	31/05/2023	10.702,00	1.070.200,00			
9 ✓	Sarung tangan steril	300	Pasang	2007478504	31/05/2023	10.783,00	3.234.900,00	APBN		
10 ✓	Sarung tangan steril	100	Pasang	2010528504	31/08/2023	10.702,00	1.070.200,00	APBN		
11 ✓	Masker (face mask)	500	Buah	10022088	31/12/2050	1.200,00	600.000,00	APBN		
12 ✓	Povidone Iodine, 30 ml	50	Buah	27072088	30/06/2023	3.520,00	176.000,00	APBN		

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN	SPESIFIKASI		HARGA		SUMBER DANA	TITIK PERMINTAAAN DARURAT TERKINI	TITIK STOK REALOKASI TERKINI
				NOMOR BETS	BATAS KADALUWARSA	HARGA SATUAN	TOTAL NILAI BARANG			
13 ✓	Plester Steril Dermafix	500	Buah	18101888	30-09-2023	4.212,00	2.106.000,00	APBD		
14 ✓	Alcohol swab 2-ply	500	Buah	190430	31-03-2024	116,00	58.000,00	APBN		
TOTAL NILAI BARANG							117.361.300,00			

.....
Yang mengeluarkan
Bendahara Materii



(Andika Tri Saputra)
Pangkat: Pengatur (II/C)
NIP 19750105 200812 1 001

.....
Yang mengangkut
Mengambil /mengantar



(Andika Tri Saputra)
Pangkat: Pengatur (II/C)
NIP 19750105 200812 1 001

Yang menerima



Nama: APLIKASTUTI
Pangkat: PENATA III/c
NIP 19750404 200212 2 004

Catatan:

- Harga satuan yang dicantumkan adalah harga satuan pada saat penerimaan terakhir

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG PERSEDIAAN

Nomor : 0851/SP03.06/J1/2022

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua puluh lima Bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (25-03-2022) di Pekanbaru, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. Nama : Arselan Syarif, SE
Pangkat/Golongan : Penata/ III.c
NIP : 19840720 201012 1 002
Jabatan : Sub Koordinator Keuangan dan BMN Perwakilan BKKBN Provinsi Riau
Alamat : Jalan Terubuk No.01 Wonorejo Kota Pekanbaru Provinsi Riau

Untuk Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

- II. Nama : Siti Rogayah
Pangkat/Golongan : Penata Tk.I / III.d
NIP : 19681207 198803 2 001
Jabatan : Penata KKB Ahli Muda
Alamat : Jalan Hangtuh No.. Bengkalis

Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Telah melakukan serah terima Barang Milik Negara yang diperuntukkan untuk pelaksanaan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan **PIHAK KEDUA** Barang Milik Negara berupa PIL KB, Gestin F3 dan Implant beserta BMHP dengan nilai total sebesar Rp.117361.300,- dengan rincian terlampir.

Pasal 2

Dengan ditandatangani Berita Acara Serah Terima ini maka tanggung jawab pengelolaan Barang Milik Negara sebagaimana tersebut dalam pasal 1 beralih dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**

Pasal 3

Demikian Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

PIHAK PERTAMA

Subkoordinator Keuangan dan BMN
Perwakilan BKKBN Prov.Riau


Arselan Syarif, SE
NIP.19840720 201012 1 002


Penata KKB Ahli Muda
DPPKB Kabupaten Bengkalis


Siti Rogayah
NIP:19681207 198803 2 001

SAKSI-SAKSI

Bendahara Materil
Perwakilan BKKBN Prov.Riau


Andika Tri Saputra
NIP.19750105 200812 1 001

Bendahara Materil
DPPKB Kabupaten Bengkalis


Aplikastuti
NIP.19750424 200212 2 004

LAMPIRAN BAST
DAFTAR BARANG PERSEDIAAN YANG AKAN DIHIBAHKAN

NO	URAIAN BARANG	KUANTITAS	SATUAN	HARGA PEROLEHAN		KONDISI	KETERANGAN
				NILAI SATUAN	JUMLAH		
1	PIL KB	2,700	SIKLUS	1,153	3,113,100	Baik	
2	IMPLANT	510	SET	179,050	91,315,500	Baik	
3	GESTIN F3	800	VIAL	11,210	8,968,000	Baik	
4	ASAM MEFENAMAT 500 MG TABLET	5,000	BUAH	280	1,400,000	Baik	
5	LIDOCAIN, 2 PERSEN INJEKSI, AMPUL	500	BUAH	1,086	543,000	Baik	
6	KAIN PENUTUP OPERASI STERIL	500	BUAH	7,206	3,603,000	Baik	
7	SAFETY BOX	5	BUAH	20,680	103,400	Baik	
8	SARUNG TANGAN STERIL	100	PASANG	10,702	1,070,200	Baik	
9	SARUNG TANGAN STERIL	300	PASANG	10,783	3,234,900	Baik	
10	SARUNG TANGAN STERIL	100	PASANG	10,702	1,070,200	Baik	
11	MASKER (FACE MASK)	500	BUAH	1,200	600,000	Baik	
12	POVIDONE IODINE 30 ML	50	BUAH	3,520	176,000	Baik	
13	PLESTER STERIL DERMAFIX	500	BUAH	4,212	2,106,000	Baik	
14	ALCOHOL SWAB 2 - PLY	500	BUAH	116	58,000	Baik	
Jumlah		12,065		261,900	117,361,300		



Gudang BKKBN RIAU
 Jl. Terubuk No. 1 Pekanbaru 28125

SURAT BUKTI BARANG KELUAR

NOMOR : 028 SBBK DAR-BKKBNRIAU VI 2022

TANGGAL : 03/06/2022

KEPADA : gudang_dppkb_bengkalis
 ALAMAT : Jl. Hang Tuah No. 08 Bengkalis
 KODE GUDANG:

Untuk Keperluan: Distribusi rutin
 Distribusi non rutin (permintaan darurat atau lainnya)

BERDASARKAN SPMB NOMOR : 020/SPMB/DAR-KBKR/VI/2022 TANGGAL : 03/06/2022
 METODE PENGIRIMAN : Dikirim Diambil Pihak Ketiga

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN	SPESIFIKASI		HARGA		SUMBER DANA	TITIK PERMINAAN DARURAH TERKINI	TITIK STOK BARANG TERKINI
				NOMOR BEIS	BATAS KADALAWATSA	HARGA SATUAN	TOTAL NILAI BARANG			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (3)x(7)	(9)	(10)	(11)
1	BU D Copet I	300	Buah	DAS2374	31/01/2027	12.500,00	3.750.000,00	APBN		
2	Implant	600	Set	OIO 30150	03/10/2023	150.015,00	90.009.000,00	APBN		
3	Suntikan, 1 cc	15.000	Vial	2C020500	30/03/2025	4.825,00	72.375.000,00	APBN		
4	PII. KB	3.000	Siklus	0193105	22/09/2025	1.153,00	3.459.000,00	APBD		
5	PII. KB	1.800	Siklus	0193106	26/09/2025	1.153,00	2.075.400,00	APBN		
6	PII. KB	200	Siklus	0193095	28/09/2025	1.153,00	230.600,00	APBN		
7	Syringe, 5 ml (Implant)	9.600	Buah	01032188	28/02/2026	818,00	7.852.800,00	APBN		
8	Asam Mefenamat, 500 mg, Tablet	5.000	Buah	KK1055	30/11/2023	310,00	1.550.000,00	APBN		
9	Plester Steril Dermatix	600	Bundl	18101888	30/09/2023	4.212,00	2.527.200,00	APBD		
10	Alcohol swab 2-ply	600	Buah	190430	31/03/2023	116,00	69.600,00	APBN		
TOTAL NILAI BARANG							183.898.600,00			



Catatan:

- Harga satuan yang dicantumkan adalah harga satuan pada saat penentuan terakhir.

(Andika Tri Saputra)
 Pangkat: Pengatur TK I (H/D)
 NIP 19750105 200812 1 001

Yang mengeluarkan
 Bendahara Materiil

(Andika Tri Saputra)
 Pangkat: Pengatur TK I (H/D)
 NIP 19750105 200812 1 001

Yang mengangkut
 Mengambil: mengantar

Nama: APLIKASTUTI
 Pangkat: PENATA (IIIc)
 NIP 19750105 200812 2 004

Yang menerima

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG PERSEDIAAN

Nomor: 1447/SP03 06/J1/2022

Pada hari ini Kamis tanggal Sembilan Bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (09-06-2022) di Pekanbaru, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. Nama : Arselan Syarif, SE
 Pangkat/Golongan : Penata/ III c
 NIP : 19840720 201012 1 002
 Jabatan : Sub Koordinator Keuangan dan BMN Perwakilan BKKBN Provinsi Riau
 Alamat : Jalan Terubuk No.01 Wonorejo Kota Pekanbaru Provinsi Riau

Untuk Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

- II. Nama : Aplikastuti
 Pangkat/Golongan : Penata / III c
 NIP : 19750424 200212 2 004
 Jabatan : Pengurus Barang Gudang alat dan Obat Kontrasepsi
 Alamat : Jalan Hangitah No. Bengkalis

Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Telah melakukan serah terima Barang Milik Negara yang diperuntukkan untuk pelaksanaan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan **PIHAK KEDUA** Barang Milik Negara berupa IUD Copper T, Suntikan 1cc, PIL KB, dan Implant beserta BMHP dengan nilai total sebesar **Rp.183.898.600,-** dengan rincian terlampir

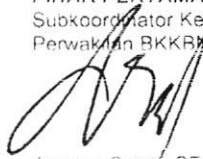
Pasal 2

Dengan ditandatangani Berita Acara Serah Terima ini maka tanggung jawab pengelolaan Barang Milik Negara sebagaimana tersebut dalam pasal 1 beralih dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**

Pasal 3

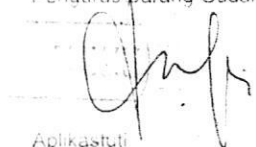
Demikian Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

PIHAK PERTAMA
 Subkoordinator Keuangan dan BMN
 Perwakilan BKKBN Prov Riau



Arselan Syarif, SE
 NIP 19840720 201012 1 002

PIHAK KEDUA
 Pengurus Barang Gudang Alat dan Obat kontrasepsi



Aplikastuti
 NIP 19750424 200212 2 004

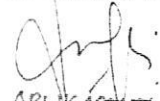
SAKSI-SAKSI

Bendahara Materi
 Perwakilan BKKBN Prov Riau



Andika Tri Saputra
 NIP 19750105 200812 1 001

Bendahara Materi
 DPPKB Kabupaten Bengkalis



APLIKASTUTI
 NIP 19750424 200212 2 004

DAFTAR BARANG PERSEDIAAN YANG AKAN DIHIBAHKAN

NO	URAIAN BARANG	KUANTITAS	SATUAN	HARGA PEROLEHAN		KONDISI	KETERANGAN	
				NILAI SATUAN	JUMLAH			
1	IUD COPPER T	300	BUAH	12.500	3.750.000	Baik		
2	IMPLANT	600	SET	150.015	90.009.000	Baik		
3	SUNTIKAN 1 CC	15.000	VIAL	4.825	72.375.000	Baik		
4	PIL.KB	3.000	SIKLUS	1.153	3.459.000	Baik		
5	PIL.KB	1.800	SIKLUS	1.153	2.075.400	Baik		
6	PIL.KB	200	SIKLUS	1.153	230.600	Baik		
7	SYRINGE 3 ML(IMPLANT)	9.600	BUAH	818	7.852.800	Baik		
8	ASAM MEFENAMAT 500 MG TABLET	3.500	BUAH	370	1.295.000	Baik		
9	PLESTER STERIL DERMAFIX	600	BUAH	4.212	2.527.200	Baik		
10	ALCOHOL SWAB 2 - PLY	600	BUAH	116	69.600	Baik		
Jumlah						183.898.600		

SURAT BUKTI BARANG KELUAR

NOMOR : 050 SBBK DAR-BKKBNRIAU IX 2022

TANGGAL : 08/09/2022

KEPADA : *gudang dppkb bengkalis*
 ALAMA : *Jl. Hang Tuah No. 08 Bengkalis*
 KODE GUDANG :

Untuk Keperluan: Distribusi rutin
 Distribusi non rutin (permintaan darurat atau lainnya)

BERDASARKAN SPMB NOMOR : 042 SPMB/DAR-KBKR IX 2022 TANGGAL : 08/09/2022
 METODE PENGIRIMAN: Dikirim Diambil Pihak Ketiga

No.	NAMA BARANG	QTY	SPEK. AS	SPESIFIKASI		HARGA		SMBD/DAK/DAK/DAK TERKINI	JENIS DANA	JENIS PELOKAN TERKINI
				NOMOR BIKS	Batas Kadaluwarsa	HARGA SATUAN	TOTAL NILAI BARANG			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (3)x(7)	(9)	(10)	(11)
1	Implant	200	Set	2A030050	31/03/2027	187.485,00	31.497.000,00	APBN		
2	Kain penutup operasi steril (Doek Steril Disposable)	200	Buah	15032288	28/02/2027	6.863,00	1.372.600,00	APBN		
3	Penutup Injeksi ampul	200	Buah	8636204699	23/06/2026	891,00	178.200,00	APBN		
4	Masker (face mask)	200	Buah	21071230602	11/07/2024	860,00	172.000,00	APBN		
5	Saring tampon steril	200	Pasang	21090306	30/06/2026	6.780,00	1.356.000,00	APBN		
6	Povidone Iodine, 30ml	40	Buah	07062288	31/03/2025	4.050,00	162.000,00	APBN		
-	Plester Steril Dermafix	200	Buah	18101888	30/09/2023	4.220,00	842.400,00	APBN		
TOTAL NILAI BARANG:								35.272.900,00		

100 67

SURAT BUKTI BARANG KELUAR

NOMOR : 058 SBBK DAR-BKKBNRIAU/X/2022

TANGGAL : 06/10/2022

KEPADA : gudang_dppkb_bengkalis
 ALAMAT : Jl. Hang Tuah No. 98 Bengkalis
 KODE GUDANG :

Untuk Keperluan: Distribusi rutin
 Distribusi non rutin (permintaan darurat atau lainnya)

BERDASARKAN SPMB NOMOR : 051 SPMB/DAR-KBKR/X/2022 TANGGAL : 06/10/2022
 METODE PENGIRIMAN : Dikirim Diambil Pihak Ketiga

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN	SPESIFIKASI		HARGA		SUMBER DANA	TITIK PERMINTAAN DARI BARU TERKINI	TITIK STOK REALOKASI TERKINI
				NOMOR BEIS	BATAN KADALUWARSA	HARGA SATUAN	TOTAL NILAI BARANG			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (3)x(7)	(9)	(10)	(11)
1	Implant	700	Set	2B030060	31/03/2027	157.485,00	110.239.500,00	APBN		
2	Eudocaine, 100 mg/ml Injeksi ampul	700	Buah	5636204699	23/06/2026	891,00	623.700,00	APBN		
3	Masker (face mask)	600	Buah	210804-0000-1	03/08/2024	860,00	516.000,00	APBN		
4	Sarung tangan steril	650	Pasang	21090306	30/06/2026	6.780,00	4.407.000,00	APBN		
TOTAL NILAI BARANG							115.786.200,00			

21 Oktober 2022
 Yang mengeluarkan
 Bendahara Materiil



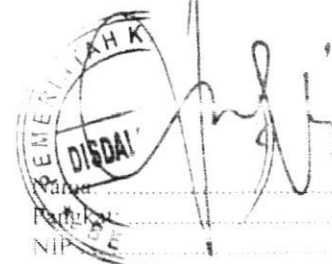
(Andika Tri Saputra)
 Pangkat: Pengatur TK I (H/D)
 NIP. 19750105 200812 1 001

Yang mengangkut
 Mengambil/mengantar



(Andika Tri Saputra)
 Pangkat: Pengatur TK I (H/D)
 NIP. 19750105 200812 1 001

Yang menerima





SURAT BUKTI BARANG KELUAR

NOMOR : 068 SBBK DAR-BKKBNRIAU XI 2022

TANGGAL : 10/11/2022

KEPADA : *gudang_dppkb_bengkalis*
 ALAMAT : *Jl. Hang Tuah No.05 Bengkalis*
 KODE GUDANG :

Untuk Keperluan : Distribusi rutin
 Distribusi non rutin (permintaan darurat atau lainnya)

DEKDIASARKAN & SIMBOL NOMOR : 068 SBBK DAR-BKKBNRIAU XI 2022
 METODE PENGIRIMAN : Dikirim Diambil Pihak Ketiga

NO	NAMA BARANG	JMLAH	SATUAN	SPESIFIKASI		BARGA		SUMBER DANA	TITIK PERMINTAAN BARANG TERKINI	TITIK STOK BARANG TERKINI
				NOMOR BILLS	BATAN KADALWARSYA	HARGA SATUAN	TOTAL NILAI BARANG			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (3)x(7)	(9)	(10)	(11)
1	Implant ✓	500	Set	2B030060	31/03/2027	157.485,00	78.742.500,00	APBN		
2	HUD Capet ✓	200	Buah	DAS2374	31/01/2027	12.500,00	2.500.000,00	APBN		
3	Masker (face mask) ✓	500	Buah	210819008-d	18/08/2024	860,00	430.000,00	APBN		
4	Lidocaine, 2 persen, infeksi, ampul ✓	500	Buah	210819008-d	18/08/2024	860,00	430.000,00	APBN		
5	Sarung tangan steril ✓	500	Pasang	21090306	30/06/2026	6.780,00	3.390.000,00	APBN		
6	Providone Iodine 30ml ✓	100	Buah	08062288	31/05/2025	3.885,00	388.500,00	APBN		
7	Swab 2-ply ✓	500	Buah	190430	31/03/2024	116,00	58.000,00	APBN		
8	Plester Steril Dermalix ✓	500	Buah	18101888	30/09/2023	4.212,00	2.106.000,00	APBN		
9	Kain operasi steril (Doek Steril Disposable) ✓	500	Buah	15032288	28/02/2027	6.863,00	3.431.500,00	APBN		
TOTAL NILAI BARANG								91.492.000,00		

SURAT BUKTI BARANG KELUAR

NOMOR : 072 SBBK/DAR-BKKBNRIAU/XII/2022

TANGGAL : 20.12.2022

KEPADA : *gudang dppkb bengkalis*
 ALAMAT : *Jl. Hang Tuah No. 98 Bengkalis*
 KODE GUDANG :

Untuk Keperluan: Distribusi rutin
 Distribusi non rutin (permintaan darurat atau lainnya)

BERBINA BERKINERJA SPMB NOMOR : 066/SPMB/DAR-KRKR XII/2022 TANGGAL : 20.12.2022
 METODE PENGIRIMAN: Dikirim Diambil Pihak Ketiga

NO	NAMA BARANG	JMLAH	SATUAN	SPESIFIKASI		HARGA		SUMBER DANA	TIDAK PERMINTA DARURAT TERKINI	TIDAK ADA REALOKASI TERKINI
				NOMOR/BUS	BATAS KADALUWARSA	HARGA SATUAN	TOTAL NILAI BARANG			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (3x7)	(9)	(10)	(11)
1	Mini Pil	1.000	Siklus	1146001	18/03/2025	4.017,00	4.017.000,00	APBN		
2	Implant	150	Set	2B030060	31/03/2027	157.485,00	23.622.750,00	APBN		
3	Lidocaine, 2 persen, injeksi, ampul	100	Buah	5636204690	23/06/2026	891,00	89.100,00	APBN		
4	Plester Steril Dematrix	100	Buah	1810/888	30/09/2023	4.212,00	421.200,00	APBN		
5	Sarung tangan steril	150	Pasang	21090306	30/06/2026	6.780,00	1.017.000,00	APBN		
6	Masker (face mask)	100	Buah	210819- 008-4	18/09/2024	160,00	16.000,00	APBN		
7	Alcohol swab 2-ply	150	Buah	190430	31/03/2024	116,00	17.400,00	APBN		
TOTAL NILAI BARANG							29.270.450,00			

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
 Daftar Persediaan Barang (Stock Opname)
 TAHUN ANGGARAN 2022

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	SATUAN	KUANTITAS	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	KET
I. Belanja Alat Tulis Kantor							
1		Binder clip no 105	kotak	2	5.700	11.400	
2		Binder clip no 111	kotak	4	11.300	45.200	
3		Buku Agenda	Pcs	1	49.000	49.000	
4		Gunting	Pcs	1	19.200	19.200	
5		Kertas HVS A4 70 gr	Rim	3	76.000	228.000	
6		Kertas HVS F4 70 gr	Rim	3	83.000	249.000	
7		Kertas Memo (stick notes)flag	Pad	2	9.900	19.800	
8		Lem Kertas (glue stick)	Pcs	1	5.900	5.900	
9		Map Gongyu	Pcs	4	45.200	180.800	
10		Stapler / Hecter (Hechmachine) no 10	Pcs	1	33.000	33.000	
11		Stapler / Hecter (Hechmachine) Anak Hecter no 10	Pak	1	31.600	31.600	
12		Stapler / Hecter (Hechmachine) Anak Hecter no 03	kotak	1	9.200	9.200	
13		Tinta Printer	Pcs	2	150.300	300.600	
14		Trigonal Clip	kotak	1	5.300	5.300	
					Jumlah	1.188.000	
II. Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya							
1		Kemunceng bulu ayam Kualitas sedang	Buah	1	64.000	64.000	
2		Pembersih Kaca	Buah	1	11.000	11.000	
					Jumlah	75.000	
III. Bahan Bahan Lainnya							
1		Kantong Plastik	Bungkus	1	53.000	53.000	
					Jumlah	53.000	
IV. Komponen Listrik							
1		Lampu 18 watt	Buah	1	67.000	67.000	
2		Lampu 45 watt	Buah	1	114.000	114.000	
3		Lampu LED 14 watt	Buah	1	79.000	79.000	
4		Lampu LED 20 watt	Buah	1	123.000	123.000	
5		Lampu LED 9 Watt	Buah	1	62.000	62.000	
6		Lampu LED AC/DC 10 Watt	Buah	1	145.000	145.000	
7		Lampu lilin 23 Watt	Buah	1	42.000	42.000	
					Jumlah	632.000	
V. Cetak Dan Pengadaan							
1		Cetak Kop Surat	Pak	1	204.000	204.000	
2		Cetak Map Dinas Ukuran Folio	Lembar	20	3.100	62.000	
					Jumlah	266.000	
VI. Belanja Meterai							
1		Meterai 10000	Lembar	10	11.000	110.000	
					Jumlah	110.000	
					Jumlah Total BHP	2.324.000	

I. NON ALOKAN/OBAT KONTRASEPSI						
1	Hanscoon (21090306)	Pasang	175	6.780,00	1.186.500	
2	Hanscoon (21090306)	Pasang	150	6.780,00	1.017.000	
3	Safety Box (2013/077)	Buah	9	20.680,00	186.120	
4	Lidocain (563204699)	Ampul	195	891,00	173.745	
5	Lidocain (563204699)	Ampul	100	891,00	89.100	
6	Povidon (08062288)	Botol	85	3.885,00	330.225	
7	Dermafix (18101888)	Buah	163	4.212,00	686.556	
8	Dermafix (18101888)	Buah	100	4.212,00	421.200	
9	Masker (210819-008-4)	Buah	160	860,00	137.600	
10	Masker (210819-008-4)	Buah	100	860,00	86.000	
11	Syringe Implant (01032188)	Buah	3.103	818,00	2.538.254	
12	Aximed Swab(190430)	Buah	160	116,00	18.560	
13	Aximed Swab(190430)	Buah	150	116,00	17.400	
14	Duk Lubang Steril(15032288)	Buah	495	6.863,00	3.397.185	
				Jumlah	10.285.445	
II. NON ALOKAN/OBAT KONTRASEPSI						
1	Plano Test (28122088)	Box	25	1.540,00	38.500	
2	Alkohol 50 mg (870220301)	Botol	14	10.000,00	140.000	
3	Amoxicilin 500 mg (B10132)	Strip	270	550,00	148.500	
4	Asam Mefenammat 500 mg (C22031)	Strip	470	550,00	258.500	
5	Povidon Iodin 1000 ml (H22301 W)	Botol	9	104.500,00	940.500	
6	Kasa Steriil (0205221616)	Box	102	10.000,00	1.020.000	
7	Bisturi (20872)	Box	337	1.100,00	370.700	
8	Hanscoon Steril No.7 (57001519)	Box	12	330.000,00	3.960.000	
9	Hanscoon Steril No.7 (20314977 SPZA)	Box	3	340.000,00	1.020.000	
10	Hanscoon Steril No.7 1/2 (57501551)	Box	9	330.000,00	2.970.000	
11	Hanscoon Steril No.7 1/2 (20314977 SPZA))	Box	3	340.000,00	1.020.000	
12	Masker (216603022011)	Buah	280	1.440,00	403.200	
13	Masker (SM 09)	Buah	1.500	1.452,00	2.178.000	
14	Lidocain (PIL 044050)	Ampul	2.200	3.127,00	6.879.400	
15	Aximed Swab (28132088)	Buah	5.050	53,125	268.281,25	
16	Dermafix (20062288)	Buah	45	3.400,00	153.000	
17	Sputit 3 cc (201023 K)	Box	190	3.300,00	627.000	
18	Sputit 3 cc (220329 M)	Box	500	3.300,00	1.650.000	
				Jumlah	24.045.581,25	
III. ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI						
1	IUD Coper T (DAS 2374)	Unit	160	12.500,00	2.000.000,00	
2	Pil KB (1193049)	cycle	550	1.153,00	634.150,00	
3	Pil KB (0193105)	cycle	100	1.153,00	115.300,00	
4	Pil KB (0193106)	cycle	500	1.153,00	576.500,00	
5	KONDOM (200921021)	Gros	139	126.540,00	17.589.060,00	
6	KONDOM (180662- 5)	Gros	17	97.630,00	1.659.710,00	
7	SUNTIKAN 1 CC (2C020500)	Vial	3.200	4.825,00	15.440.000,00	
8	MINI PIL (1146001)	Vial	1.000	4.017,00	4.017.000,00	
9	IMPLANT (28030060))	Set	140	157.485,00	22.047.900,00	
10	IMPLANT (28030060))	Set	150	157.485,00	23.622.750,00	
11	Fallpering	Pasang	70	30.030,00	2.102.100,00	
				Jumlah	89.804.470,00	
				Jumlah Total Oba	124.135.496,25	

Total BRP + Obat: 126.459.496,25

**PENGURUS BARANG
PENGUNA**

YESMAR
NIP. 19720830 200901 1003

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BENGKALIS**

H. HAMBALI, S.Pd.I
NIP. 19670305 198811 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
 RINCIAN ASET DAN PERHITUNGAN HARGA PEROLEHAN
 TAHUN ANGGARAN 2022

DOKUMEN SUMBER	Rincian>Nama Aset	Quantity		Nilai Kontrak	Pajak			Belanja Modal			Biaya-biaya Penunjang		Nilai ATR					
		VOL	Satuan		PPN (10%)	PPH 22	PPH Final Psl 24	Perencanaan	Pengawasan	Pegawai/Brg Jasa	Biaya Pegawai	Biaya Barang dan Jasa	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Jaringan dan Irigasi	Aset tetap Lainnya	Aset Lainnya
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	<i>Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>																	
	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya																	
BKU JUN-B02/0946/13 JUN 22	KAMERA FOTO	1	Unit	21.467.400,00										21.467.400,00				
	Belanja Modal Peralatan Personal Computer																	
BKU FEB-B02/0133/25 FEB 22	HARDISK EKSTENAL	1	Unit	1.800.000,00										1.800.000,00				
	<i>Pengadaan Mebel</i>																	
BKU MAR-B02/0398/30 MAR 22	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat																	
SPK No:01/SPK/PL/DPPKB/II/2002 Tgl 21 Feb 2022	MEJA RAPAT	12	Unit	69.432.000,00										69.432.000,00				
	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat																	
BKU MAR-B02/0392/30 MAR 22 SPK No:02/SPK/PL/DPPKB/II/2022 Tgl 21 Feb 2022	KURSI	20	Unit	31.790.000,00										31.790.000,00				
	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>																	
08/SP/DPPKB/V/2022 TGL 23 Mei 2022	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya																	
	CCTV	1	Unit	11.677.200,00										11.677.200,00				
	Belanja Modal Alat Pendingin																	
SPK No:476/SPK/DPPKB/V/2022/06 Tgl 24 Mei 2022	PENGADAAN AC KANTOR	4	Unit	39.427.200,00										39.427.200,00				
	Belanja Modal Alat Dapur																	
09/SP/DPPKB/V/2022 TGL 23 Mei 2022	DISPENSER	5	Unit	8.284.485,00										8.284.485,00				
	Belanja Modal Alat Studio Lainnya																	
SPK No:476/SPK/DPPKB/V/2022/07 Tgl 24 Mei 2022	TELEVISI SMART TV 49"	2	Unit	17.094.000,00										17.094.000,00				
	Belanja Modal Personal Computer																	
10/SPK/PL/DPPKB/V/2022 TGL 23 Mei 2022	LAPTOP	3	Unit	59.840.100,00										59.840.100,00				
05/SPK/PL/DPPKB/V/2022 TGL 23 Mei 2022	PERSONAL COMPUTER	2	Unit	35.409.000,00										35.409.000,00				
	Belanja Modal Peralatan Jaringan																	
04/SP/DPPKB/V/2022 TGL 23 Mei 2022	PRINTER EPSON L360	2	Unit	8.293.920,00										8.293.920,00				
11/SP/DPPKB/V/2022 TGL 23 Mei 2022	UNINTERRUPTABLE POWER SUPPLY (UPS)	2	Unit	17.959.800,00										17.959.800,00				
	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya																	
SP No:8/SZ/DPPKB/II/22 TGL 3 NOVEMBER 22	Monitoranomi Set/Television Set	1	Set	18.000.000,00														
SP No:12/SZ/DPPKB/II/22 TGL 3 NOVEMBER 22	VIT KIT	1	Kit	8.838.000,00														
	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya																	
12/SPK/PL/DPPKB/V/2022 RGL 23 MEI 22	SCANNER 40 PPM	2	Unit	21.178.800,00										21.178.800,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Belanja Modal Sumur Pemboran																	
SPK NO: 24/SPK/APBD/DPPKB/XI/20 22 TGL: 7 NOV 22	Pembuatan dan Pemasangan Sumur Bor Lengkap	1	Unit	29.938.000,00											29.938.000,00			
	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor																	
SPK No. 21/SPK/APBD/DPPKB/XI/20 22	Tempat Baleho Permanen	1	Unit	49.888.000,00										49.888.000,00				
SPK NO: 25/SPK/APBD/DPPKB/XI/20 22 TGL: 21 NOV 22	Pembuatan Balho Permanen utk Kecamatan	8	Unit	131.481.000,00										179.399.000,00				
SPK NO-01/SPK-PRC/APBD- P/DPPKB/X/2022 TGL 24 OKT 22	Konsultan Perencanaan Pembuatan Balho Utk Kec	8	Unit	47.918.000,00														
	Belanja Modal Bangunan Parkir																	
SPK NO: 20/SPK/APBD/DPPKB/XI/20 22 TGL 7 NOV 22	Pengadaan Pembangunan Tempat Parkir Kendaraan pada Balai Penyuluhan KB Kec. Talang Mandau	1	Unit	39.926.000,00											39.926.000,00			
	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya																	
SPK NO:23/SPK/APBD/DPPKB/XI/ 2022 TGL 7 NOV 22	Pembuatan dan Pemasangan Tower Air (Pinguin Lengkap) Pada Balai Kec Talang Mandau	1	Unit	29.935.000,00											29.935.000,00			
	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>																	
	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor																	
SPK NO:22/SPK/APBD/DPPKB/XI/ 2022 TGL 7 NOVEMBER 22	PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR DINAS DPPKB	1	Unit	59.600.000,00														
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB																	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya:																	
SPK NO-01/SPK/DAK/DPPKB/V/2 022 TGL: 23 MEI 22	Peningkatan Sarana Penunjang Kelengkapan Balai Penyuluhan KB Kec. BANTAN			33.063.063,06														
	CCTV 5 Camera + TV Monitor	1	Set	5.855.855,86										5.855.855,86				
	Warles + Mic	1	Set	3.153.153,15										3.153.153,15				
	TV 30" + Parabola + Breiked	1	Set	4.954.954,95										4.954.954,95				
	Layar Infokus	1	Unit	1.216.216,22										1.216.216,22				
	Kursi Kerja	1	Unit	1.351.351,35										1.351.351,35				
	Kursi Kerja 1/2 Biro	1	Unit	1.801.801,80										1.801.801,80				
	Almari	1	Buah	2.252.252,25										2.252.252,25				
	Dispenser	1	Unit	2.117.117,12										2.117.117,12				
	Rak Buku	1	Buah	1.351.351,35										1.351.351,35				
	Kipas Angin	4	Unit	2.702.702,70										2.702.702,70				
	Generator Set (5 -10 kva)	1	Buah	6.306.306,31										6.306.306,31				
02/SPK/DAK/DPPKB/V/2022 TGL 23-05-2022	Peningkatan Sarana Penunjang Kelengkapan Balai Penyuluhan KB Kec. BATHIN SOLAPAN	1	Unit	40.135.135,13														
	CCTV 5 Camera + TV Monitor	1	Set	5.405.405,41										5.405.405,41				
	Warles + Mic	1	Set	3.153.153,15										3.153.153,15				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
SPK NG-03/SPK/DAK/DPPKB/V/2 022 TGL: 23 MEI 22	Peningkatan Sarana Penunjang Kelengkapan Balai Pembangunan KB Kec. BENGKALIS	1	Set	13.513.513,51										13.513.513,51					
		1	Unit	2.252.252,25											2.252.252,25				
		1	Unit	1.351.351,35											1.351.351,35				
		1	Unit	2.072.072,07											2.072.072,07				
		2	Unit	1.081.081,08											1.081.081,08				
		1	Buah	2.027.027,03											2.027.027,03				
		1	Buah	1.351.351,35											1.351.351,35				
		1	Unit	6.306.306,31											6.306.306,31				
		1	Buah	1.621.621,62											1.621.621,62				
		1	Unit	35.360.360,35															
		1	Set	5.855.855,86											5.855.855,86				
		1	Set	3.513.513,51											3.513.513,51				
		1	Set	4.954.954,95											4.954.954,95				
		1	Unit	1.216.216,22											1.216.216,22				
		1	Buah	1.351.351,35											1.351.351,35				
		1	Buah	1.801.801,80											1.801.801,80				
		1	Buah	2.252.252,25											2.252.252,25				
1	Unit	2.252.252,25											2.252.252,25						
1	Buah	1.351.351,35											1.351.351,35						
4	Buah	2.702.702,70											2.702.702,70						
1	Buah	6.306.306,31											6.306.306,31						
1	Unit	1.801.801,80											1.801.801,80						
1	Unit	40.270.270,28																	
1	Set	5.405.405,41											5.405.405,41						
1	Set	3.423.423,42											3.423.423,42						
1	Set	4.774.774,77											4.774.774,77						
1	Unit	1.216.216,22											1.216.216,22						
3	Buah	4.054.054,05											4.054.054,05						
3	Buah	5.405.405,41											5.405.405,41						
1	Unit	1.666.666,67											1.666.666,67						
1	Unit	2.117.117,12											2.117.117,12						
3	Unit	2.027.027,03											2.027.027,03						
1	Buah	2.252.252,25											2.252.252,25						

SPK
NG-04/SPK/DAK/DPPKB/V/2
022 TGL: 23 MEI 2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
05/SPK/DAK/DPPKB/V/2022 TGL: 23 Mei 2022	Rak Buku	1	Buah	1.621.621,62										1.621.621,62					
	Generator Set (5-10 kva)	1	Buah	6.306.306,31											6.306.306,31				
	Peningkatan Sarana Penunjang Kelengkapan Balai Penyuluhan KB Kec. MANDAU			35.585.585,57															
	Kursi Kerja	2	Unit	2.702.702,70											2.702.702,70				
	Meja Rapat 1/2 Biro	2	Unit	3.603.603,60											3.603.603,60				
	CCTV 5 Camera + TV Monitor	1	Set	5.405.405,41											5.405.405,41				
	Warles+ Mic	1	Set	3.153.153,15											3.153.153,15				
	TV 30" + Parabola +Brelked	1	Set	4.504.504,50											4.504.504,50				
	Layar Infokus	1	Set	1.351.351,35											1.351.351,35				
	Dispenser	1	Set	2.252.252,25											2.252.252,25				
	Kipas Angin Dinding	4	Unit	2.702.702,70											2.702.702,70				
	Almari	1	Buah	2.252.252,25											2.252.252,25				
	Rak Buku	1	Buah	1.351.351,35											1.351.351,35				
	Generator Set	1	Unit	6.306.306,31											6.306.306,31				
	Peningkatan Sarana Penunjang Kelengkapan Balai Penyuluhan KB Kec. PINGGIR:			35.585.585,60															
07/SPK/DAK/DPPKB/V/2022 23 Mei 2022	Kursi Kerja	2	Unit	2.702.702,70										2.702.702,70					
	Meja Rapat 1/2 Biro	2	Unit	3.603.603,60											3.603.603,60				
	CCTV 5 Camera + TV Monitor	1	Set	5.405.405,41											5.405.405,41				
	Warles+ Mic	1	Set	3.198.198,20											3.198.198,20				
	TV 30" + Parabola +Brelked	1	Set	4.504.504,50											4.504.504,50				
	Layar Infokus	1	Set	1.306.306,31											1.306.306,31				
	Dispenser	1	Set	2.252.252,25											2.252.252,25				
	Kipas Angin Dinding	4	Unit	2.702.702,72											2.702.702,72				
	Almari	1	Buah	2.252.252,25											2.252.252,25				
	Rak Buku	1	Buah	1.351.351,35											1.351.351,35				
	Generator Set	1	Unit	6.306.306,31											6.306.306,31				
	Peningkatan Sarana Penunjang Kelengkapan Balai Penyuluhan KB Kec. RUPAT			35.090.090,08															
	Kursi Kerja	2	Buah	2.702.702,70											2.702.702,70				
	Meja Kerja 1/2 Biro	2	Unit	3.603.603,60											3.603.603,60				
	CCTV 5 Camera + TV Monitor	1	Set	5.405.405,41											5.405.405,41				
Warles + Mic	1	Set	3.153.153,15											3.153.153,15					
TV 30" + Parabol + Brelked	1	Set	4.774.774,77											4.774.774,77					
Layar Infocus	1	Unit	1.261.261,26											1.261.261,26					
Dispenser	1	Unit	2.252.252,25											2.252.252,25					
Kipas Angin Dinding	3	Unit	2.027.027,03											2.027.027,03					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
NO:13/SPK/DAK/DPPKB/VI/2022 TGL.23 MEI 2022	SEMENISASI JALAN MASUK			50.121.819,44														
	Perkir			17.977.468,25														
SPK No: 17/SPK-PWS/DAK/DPPKB/VI/2022 TGL.23 MEI 22	Jasa Konsultan Pengawasan Balai Penyuluhan KB Kec Bengkalis	1	Unit	4.500.000,00														
SPK No: 16/SPK-PRC/DAK/DPPKB/III/2022 TGL.8 MARET 22	Jasa Konsultan Perencanaan Balai Penyuluhan KB Kec Bengkalis	1	Unit	3.000.000,00														
SPK NO:18/SPK/DAK/DPPKB/VI/2022 022.TGL.23 MEI 22	Peningkatan Balai Penyuluhan KB Bengkalis	1	Unit	63.734.975,41											71.234.975,41			
	SEMENISASI JALAN MASUK + DUURKER	1	Unit	45.809.576,29														
	Perkir	1	Unit	17.925.399,12														
	Jasa Konsultan Pengawasan Balai Penyuluhan KB Kec Bukit Batu	1	Unit	4.500.000,00														
	Jasa Konsultan Perencanaan Balai Penyuluhan KB Kec Bukit Batu	1	Unit	3.000.000,00														
SPK NO:21/SPK/DAK/DPPKB/VI/2022 022.TGL.23 MEI 22	Peningkatan Balai Penyuluhan KB Bukit Batu			67.369.921,14											74.869.921,14			
	SEMENISASI JALAN MASUK	1	Unit	49.644.957,39														
	Perkir	1	Unit	17.724.963,75														
SPK No: 23/SPK-PWS/DAK/DPPKB/VI/2022 TGL.23 MEI 5/D 21 JULI 2022	Jasa Konsultan Pengawasan Balai Penyuluhan KB Kec Mandau	1	Unit	5.000.000,00														
SPK NO:35/SPK-PRC/DAK/DPPKB/III/2022 TGL.8 MARET 22	Jasa Konsultan Perencanaan Balai Penyuluhan KB Kec Mandau	1	Unit	3.500.000,00														
	Peningkatan Balai Penyuluhan KB Mandau:	1	Unit	60.088.474,69											68.588.474,69			
SPK NO:24/SPK/DAK/DPPKB/VI/2022 022.TGL.23 MEI 22	SEMENISASI JALAN MASUK			41.424.139,79														
	Perkir			18.664.334,90														
SPK No: 26/SPK-PWS/DAK/DPPKB/VI/2022 TGL.23 MEI 5/D 21 JULI 2022	Jasa Konsultan Pengawasan Balai Penyuluhan KB Kec Pinggir	1	Unit	5.000.000,00														
SPK NO:30/SPK-PRC/DAK/DPPKB/III/2022 TGL.8 MARET 22	Jasa Konsultan Perencanaan Balai Penyuluhan KB Kec Pinggir	1	Unit	3.500.000,00														
	Peningkatan Balai Penyuluhan KB Pinggir	1	Unit	44.587.038,68											53.087.038,68			
SPK NO:27/SPK/DAK/DPPKB/VI/2022 022.TGL.23 MEI 22	Perkir			18.009.846,05														
	Semen jalan masuk			26.577.190,63														
SPK No: 29/SPK-PWS/DAK/DPPKB/VI/2022 TGL.23 MEI 5/D 21 JULI 2022	Jasa Konsultan Pengawasan Balai Penyuluhan KB Kec Rupat	1	Unit	5.000.000,00														
SPK NO:34/SPK-PRC/DAK/DPPKB/III/2022 TGL.8 MARET 22	Jasa Konsultan Perencanaan Balai Penyuluhan KB Kec Rupat	1	Unit	3.500.000,00														
	Peningkatan Balai Penyuluhan KB Rupat	1	Unit	62.644.712,39											71.144.712,39			
SPK NO:30/SPK/DAK/DPPKB/VI/2022 022.TGL.23 MEI 22	SEMENISASI JALAN MASUK			44.636.681,34														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Parkir			18.008.031,05														
SPK NO: 32/SPK-PWS/DAK/DPPKB/VI/2022 TGL 23 M31 S/D 21 JULI 22	Jasa Konsultan Pengawasan Balai Penyuluhan KB Kec Rupal Utara	1	Unit	5.000.000,00														
SPK NO: 37/SPK-PRC/DAK/DPPKB/III/2022 TGL 8 MARET 22	Jasa Konsultan Perencanaan Balai Penyuluhan KB Kec Rupal Utara	1	Unit	3.500.000,00														
	Peningkatan Balai Penyuluhan KB Rupal Utara	1	Unit	69.544.617,01											78.044.617,01			
SPK NO:33/SPK/DAK/DPPKE/VI/2022 TGL:23 MEI 22	Semer. Isasi Jalan Masuk	1	Unit	51.385.781,45														
	Parkir	1	Unit	18.158.835,56														
SPK NO:35/SPK-PWS/DAK/DPPKB/VI/2022	Jasa Konsultan Pengawasan Balai Penyuluhan KB Kec Siak Kecil	1	Unit	4.500.000,00														
SPK NO:40/SPK-PRC/DAK/DPPKB/III/2022 TGL 8 MARET 22	Jasa Konsultan Perencanaan Balai Penyuluhan KB Kec Siak Kecil	1	Unit	3.000.000,00														
	Peningkatan Balai Penyuluhan KB Siak Kecil	1	Unit	61.638.431,36											69.138.431,36			
SPK NO:36/SPK/DAK/DPPKE/VI/2022 TGL 23 MEI 22	Semer. Isasi Jalan Masuk			21.956.733,81														
	Parkir			39.681.697,55														
	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua																	
39/SPK-FB/DAK/DPPKB/VI/2022 TGL 09 Mei 2022	Kendaraan Roda Dua Jemput Antar Calon Akseptor	6	Unit	180.000.000,00										180.000.000,00				
	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya:																	
	Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Balai Penyuluhan KB K/c. Talang Muandau	1	Paket	18.000.000,00														
SPK NO:46/SPK-PRC/DAK/DPPKB/III/2022 TGL 8 MARET 22	Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Balai Penyuluhan KB K/c. Talang Muandau	1	Paket	7.000.000,00														
SP NO 476/SP/DAK/DPPKB/VI/2022/42 TGL 20 JUNI 22	Pembangunan Balai Penyuluhan KB Kec. Talang Muandau	1	Unit	314.754.496,00											339.754.496,00			
	PEKERJAAN LAIN-LAIN:																	
	MEJA 1/2 EIRO	4	Unit	3.552.000,00										3.552.000,00				
	KURSI KANTOR	4	Unit	1.998.000,00														
	KURSI RAPAT PLASTIK	30	Unit	4.495.500,00														
	LEMARI ARSIP PEJABAT	2	Unit	1.887.000,00										1.887.000,00				
Total Aset Keseluruhan														1.094.776.301,38	1.077.551.828,88			

Bengkalis, Februari 2023

KETERANGAN:

TIDAK MASUK KAPITALISASI ASET	
BM GB MASUK KATEGORI PM	234.726.000,00
BM PM MASUK KATEGORI GB	29.938.000,00
BM PM TDK JADI ASET	21.838.000,00
BJ JADI ASET PM	336.396.396,38
BJ JADI ASET GP	637.998.332,88
BM PM JADI ASET	523.653.905,00
BM GB JADI ASET	409.615.496,00
BM GB tak jadi Aset	106.093.500,00
ASET 2022	2.172.328.130,26
	2.172.328.130,26





PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BENGKALIS
REKAPITULASI MUTASI ASET TETAP RAMPUNG
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 Desember 2022

No.	Kelompok Aset Tetap	Saldo Awal 1 Januari 2022	Koreksi Hasil Inventarisasi		Saldo Awal Setelah Koreksi Hasil Inventarisasi	Mutasi tambah Tahun 2022			Saldo Akhir per 30 Desember 2022	Keterangan
			Penambahan	Pengurangan		Transfer Masuk	Pembelian	Transfer Keluar		
HAK PENGUSAHAAN SKPD:										
1	Tanah	373.525.000,00			373.525.000,00		0,00		373.525.000,00	
2	Peralatan dan Mesin	5.550.493.513,74			5.550.493.513,74		1.094.776.301,38		6.645.269.815,12	
4	Gedung dan Bangunan	6.246.982.246,97			6.246.982.246,97		1.077.551.828,88		7.324.534.075,85	
3	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00			0,00		0,00		0,00	
5	Aset Tetap Lainnya	35.219.800,00			35.219.800,00		0,00		35.219.800,00	
	SUB JUMLAH (1)	12.206.220.560,71	0,00	0,00	12.206.220.560,71	0,00	2.172.328.130,26	0,00	14.378.548.690,97	
HAK PENGUSAHAAN PUBLIK:										
1	Tanah	0,00			0,00				0,00	
2	Peralatan dan Mesin	0,00			0,00				0,00	
3	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00			0,00				0,00	
4	Gedung dan Bangunan	0,00			0,00				0,00	
5	Aset Tetap Lainnya	0,00			0,00				0,00	
6	Aset Lainnya	0,00			0,00				0,00	
	SUB JUMLAH (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ASSET TETAP:										
1	Tanah	373.525.000,00		0,00	373.525.000,00	0,00	0,00		373.525.000,00	
2	Peralatan dan Mesin	5.550.493.513,74		0,00	5.550.493.513,74	0,00	1.094.776.301,38		6.645.269.815,12	
3	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00		0,00	6.246.982.246,97	0,00			7.324.534.075,85	
4	Gedung dan Bangunan	6.246.982.246,97		0,00	0,00	0,00	1.077.551.828,88	0,00	0,00	
5	Aset Tetap Lainnya	35.219.800,00		0,00	35.219.800,00	0,00	0,00		35.219.800,00	
	JUMLAH (1 + 2)	12.206.220.560,71	0,00	0,00	12.206.220.560,71	0,00	2.172.328.130,26	0,00	14.378.548.690,97	

Bengkalis, Februari 2023
 KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
 KELUARGA BERENCANA
 KABUPATEN BENGKALIS





PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
LAPORAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Sampai dengan 31-Desember-2022

Bidang : Bidang Kependudukan
Unit Organisasi : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

KODE ASET	NO REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA	AKUMULASI	PENYUSUTAN		AKUMULASI	NILAI BUKU
					MANFAAT	PENYUSUTAN	Semester I	Semester II	PENYUSUTAN	
					Thn	1 Jan 2022			31-Des-2022	
Aset Tetap				14.005.023.691						1.511.797.975
2		PERALATAN DAN MESIN		6.645.269.815		4.503.875.601	286.278.517	343.317.722	5.133.471.840	1.511.797.975
1.3.2.1		ALAT BESAR								
1.3.2.1.3		ALAT BANTU		10.850.000		3.755.952	775.000	775.000	5.305.952	5.544.048
1.3.2.2		ALAT ANGKUTAN								
1.3.2.2.1		ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR		2.080.027.873		1.672.997.041	79.335.000	83.591.667	1.835.923.708	244.104.165
1.3.2.2.2		ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR		550.000		297.917	137.500	114.583	550.000	0
1.3.2.5		ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA								
1.3.2.5.1		ALAT KANTOR		1.532.173.166		985.664.528	63.917.269	78.904.355	1.128.486.152	403.687.014
1.3.2.5.2		ALAT RUMAH TANGGA		1.175.264.468		716.811.414	55.475.886	76.289.922	848.577.222	326.687.246
1.3.2.5.3		MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT		510.926.607		448.834.297	19.512.630	14.841.778	483.188.705	27.737.902
1.3.2.6		ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR								
1.3.2.6.1		ALAT STUDIO		49.492.200		5.032.500	1.962.950	4.949.220	11.944.670	37.547.530
1.3.2.6.2		ALAT KOMUNIKASI		3.500.000		2.858.333	350.000	291.667	3.500.000	0
1.3.2.6.3		PERALATAN PEMANCAR		201.096.757		120.624.000	3.486.945	8.216.679	132.327.624	68.769.133
1.3.2.7		ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN								
1.3.2.7.1		ALAT KEDOKTERAN		134.225.000		20.577.085	13.422.500	13.422.500	47.422.085	86.802.915
1.3.2.10		KOMPUTER								
1.3.2.10.1		KOMPUTER UNIT		629.958.946		289.326.464	39.579.545	50.824.975	379.730.984	250.227.962
1.3.2.10.2		PERALATAN KOMPUTER		317.204.799		237.096.071	8.323.292	11.095.376	256.514.739	60.690.060
3		GEDUNG DAN BANGUNAN		7.324.534.076		1.092.982.988	96.442.830	106.135.615	1.295.561.433	6.028.972.643
1.3.3.1		BANGUNAN GEDUNG								
1.3.3.1.1		BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA		7.236.659.776		1.075.164.029	94.978.258	104.671.043	1.274.813.330	5.961.846.446
1.3.3.3		BANGUNAN MENARA								
1.3.3.3.1		BANGUNAN MENARA PERAMBUAN		87.874.300		17.818.959	1.464.572	1.464.572	20.748.103	67.126.197
5		ASET TETAP LAINNYA		35.219.800		0	0	0	0	35.219.800
1.3.5.1		BAHAN PERPUSTAKAAN								
1.3.5.1.1		BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK		35.219.800		0	0	0	0	35.219.800
Jumlah Aset Tetap				14.005.023.691		5.596.858.589	382.721.347	449.453.337	6.429.033.273	7.575.990.418
Jumlah				14.005.023.691		5.596.858.589	382.721.347	449.453.337	6.429.033.273	7.575.990.418



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
REKAPITULASI MUTASI ASET LAINNYA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2022

No.	Kelompok Aset Lainnya	Saldo Awal per 1 Januari 2022 (Rp)	Koreksi Hasil Inventarisasi		Saldo Awal Setelah Koreksi Hasil Inventarisasi	Mutasi Tambah Tahun 2022		Saldo Akhir per 31 Desember 2022 (Rp)	Keterangan
			Penambahan	Pengurangan		Transfer Masuk	Pembelian (Rp)		
1	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran				0,00		0,00	0,00	
2	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah				0,00		0,00	0,00	
3	Kemitraan dengan Pihak Ketiga				0,00		0,00	0,00	
4	Aset Tak Berwujud	39.500.000,00			39.500.000,00		-	39.500.000,00	
5	Aset Lain-lain -Reklas Aset 2013				0,00			0,00	
JUMLAH		39.500.000,00	-	-	39.500.000,00		-	39.500.000,00	

Bengkalis, Februari 2023
 KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
 DAN KELUARGA BERENCANA
 KABUPATEN BENGKALIS





PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
AMORTISASI PENYUSUTAN ASET TETAP LAINNYA

No.	Kode Barang	Jenis Barang/ Nama Barang	Tahun Pembelian	Harga (Rp.)	Masa Manfaat (Th)	Penyusutan					
						Des-18	Jun-19	Des-19	Jun-20	Des-20	Akumulasi Penyusutan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		Aset Tetap Lainnya Tahun 2014 (Buku Peraturan dan Perundang-undangan)	31-Dec-14	20.246.600,00	5	16.534.723,33	2.362.103,33	1.349.773,33			
2		Aset Tetap Lainnya Tahun 2015 (Buku Umum Lain-Lain)	31-Dec-15	14.973.200,00	5	9.233.473,33	1.746.873,33	1.746.873,33	1.077.238,56	1.168.741,44	
TOTAL				35.219.800,00		25.768.196,67	4.108.976,67	3.096.646,67	1.077.238,56	1.168.741,44	35.219.800,00

NB : Perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset sesuai dengan Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 67 Tahun 2015 tentang Penyusutan.

Bengkalis, Februari 2023

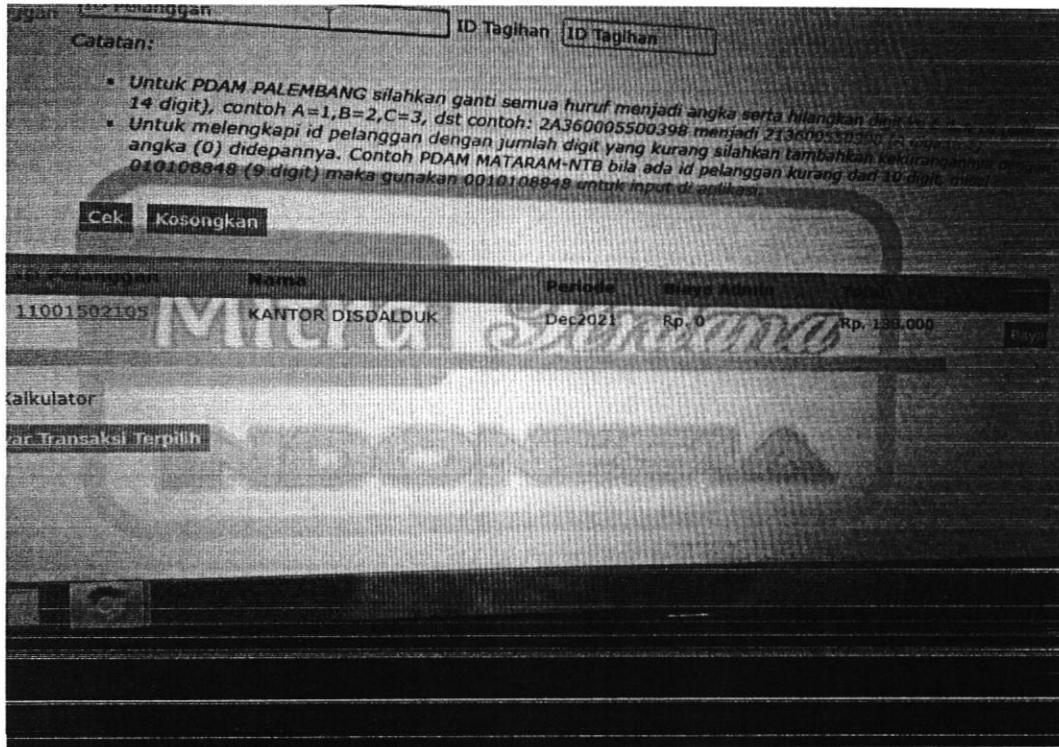


PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
REKAPITULASI UTANG JANGKA PENDEK BEBAN JASA BULAN DESEMBER
TAHUN 2022

No.	Jenis Belanja Jasa	No ID Pel	Jumlah (Rp.)	Keterangan
	Des-21			Menjadi Utang Belanja untuk Tahun Anggaran Berikutnya Jumlah Tagihan dibayar Bulan Januari Tahun berikutnya Merupakan Beban Pascabayar
1	Telepon	0766-23644		
2	Air	11001502105	132.500,00	
3	Listrik	182300087068	9.894.861,00	
4	Internet	011-1519100806	916.000,00	
	Jumlah		10.943.361,00	
	Des-22			
1	Telepon	0766-23644		
2	Air	11001502105	143.500,00	
3	Listrik	182300087068	9.984.143,00	
		182302191953		
4	Internet	011-1519100806	1.007.050,00	
	Jumlah		11.134.693,00	

LAMPIRAN X

TAGIHAN AIR DESEMBER : 130.000,00
BIAYA ADM: 2.500,00
132.500,00



PT. PLN (PERSERO) WILAYAH RIAU DAN KEPRI

Kode Rekening : 80AAACK1180

Jl. Dumai

ULP BENGKALIS

INFORMASI REKENING LISTRIK PELANGGAN

th Pelanggan ULP BENGKALIS

Terima kasih kami ucapkan atas kepeduliannya dalam membayar rekening listrik tepat waktu setiap bulannya.

Dengan ini kami menginformasikan jumlah Tagihan Bapak/Ibu untuk Rekening listrik JANUARI 2022 sebagai berikut:

Nama : BASIC EDUCATION B
No. Pelanggan : 182300087068
Alamat : JL HANSTURAH NO 8
Kec / Desa : 81/41800 WA

Jumlah Tagihan (belum termasuk biaya Administrasi) Rp. : 9891861 + Biaya Listrik

20.854.861

Mohon untuk segera melakukan pembayaran rekening listrik sebelum tanggal 20 JANUARI 2022, agar terhindar dari biaya keterlambatan dan PEMUTUSAN SEMENTARA aliran listrik yang dapat mengganggu aktivitas Bapak/Ibu.

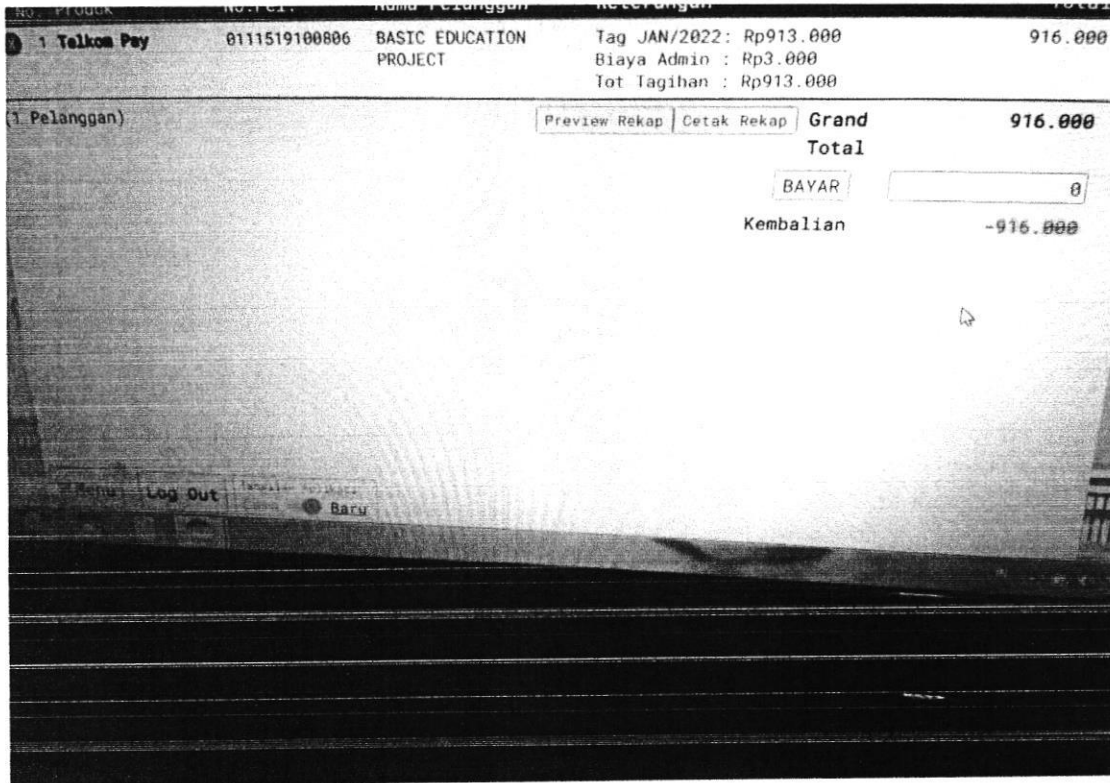
ABAIKAN PEMBERITAHUAN INI JIKA SUDAH MEMBAYAR TAGIHAN

BENGKALIS, 04-01-2022

ANDIKO BESTARI

LAMPIRAN X

TAGIHAN INTERNET DESEMBER 21: 913.000,00
BIAYA ADMINISTRASI: 3.000,00
916.000,00



ONPAYS

PDAM KAB BENGKALIS

882FEBD9CA5A41FC

9D00000D0CF45412F

TGLBYR : 19-01-2023 12:36:26

NO PEL. : 11001502105

NAMA : KANTOR DISDALDUK

ALAMAT : JL HANGTUAH

GOL : R3

LN REK : Dec-2022

PEMAKAIAN : 28 M3

JML TGHN : RP. 141.000,00

ADMIN : RP. 2.500,00

JML TGHN : RP. 143.500,00

MITRAFAKONNIPJ521
OPS/CA
19-01-2023/12:36:24



ONPAYS

BUKTI PEMBAYARAN REKENING AIR PDAM KAB BENGKALIS

882FEBD9CA5A41FC9D0C0C0D2F45412F

NO PEL. : 11001502105

NAMA : KANTOR DISDALDUK

ALAMAT : JL HANGTUAH

TGL BAYAR: 19-01-2023 12:36:26

BLN REK : Dec-2022

MTR AW/AK: 2452-2490

PEMAKAIAN: 28 M3

GOL : R3

RINCIAN TAGIHAN

TAGIHAN : RP. 141.000,00

ADMIN : RP. 2.500,00

TOTAL : RP. 143.500,00

PDAM KAB BENGKALIS Menyatakan Resi ini
Sebagai Bukti Pembayaran yang Sah.

MITRAFAKONNIPJ521
OPS/CA
19-01-2023/12:36:24



BANK BSE
PP BENGKALIS PONSEL
STRUK PENERIMAAN LISTRIK
MEDIABISNIS01325

TIPEL : 141300097066
NAMA : BASIC EDUCATION P
TARIF/DAYA : P1/41500 VA
BL/TH : JAN23
TGL BAYAR : 2023-01-30 10:08:01
STAND METER : 00610123-00610091
RP TAG PLN : Rp. 9.981.143
ADMIN BANK : Rp. 3.000
TOTAL BAYAR : Rp. 9.984.143
NOREF : 0JUT0136114409A5
EPCSCA12076A6BA7

BANK BSE
PP BENGKALIS PONSEL/MEDIABISNIS01325
TGL BAYAR : 2023-01-30 10:08:01
STRUK PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK

TIPEL : 141300097066
NAMA : BASIC EDUCATION P
TARIF/DAYA : P1/41500 VA
BL/TH : JAN23
STAND METER : 00610123-00610091
RP TAG PLN : Rp. 9.981.143
NO REF : 0JUT0136114409A5EPCSCA12076A6BA7

PLN menyatakan struk ini sebagai bukti pembayaran yang sah.
ADMIN BANK : Rp. 3.000
TOTAL BAYAR : Rp. 9.984.143

Terima Kasih

"Informasi Nomor Call Center 123

Atas

Hub PLN Terdekat :"



Telkom
Indonesia

Disini menerima pembayaran PBB wilayah Jateng dan Jabar
TIRTA DHARMA

SEGI PELUNASAN TELKOM PAY

STRUK PEMBAYARAN TAGIHAN TELKOM PAY

BLN: JAN23

TGL : 18/01/2023

NO : 0111519100800

NAMA: BASIC EDUCATION PROJECT

NEWP:

REF: 301A

BLN TAGIHAN : JAN23

NO TLP : 0111519100800

NAMA PLS : BASIC EDUCATION PROJECT

NEWP :

NO REF : 301A

RP TAGIHAN : Rp. 1.004.550,00

ADMIN : Rp. 2.500,00

TOTAL : Rp. 1.007.050,00

SWITCH REF : 6D55A8A2677B4D0BB0D755698E28BD7F

TGL BYR : 18/01/2023

LAYANAN : 001001

1.004.550,00

2.500,00

1.007.050,00

REF: 6D55A8A2677B4D0B

6D55A8A2677B4D0B

TELKOM menvatakan struk ini

sebagai bukti pembayaran yang san TERIMA KASIH

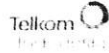
MUTRAFADANP0521/

20230118123438/18012023

123525/CU1

MUTRAFADANP0521/MEI - F000118/005

20230118123438/18012023 123525/CU1





PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

Jalan Hang Tuah No. 08 Bengkulu Kode Pos : 28712
Telepon (0766) 23645 Fax. (0766) 23644 Email : dppkbbengkalis@gmail.com
Website : www.disdalduk-kb.bengkalis.go.id

BERITA ACARA PENYERAHAN BARANG

Nomor : /BAPB/DPPKB/XII/2022

Tanggal : 08 Desember 2022

Pada hari ini Kamis tanggal Delapan bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **BENNY NASRIAWAN. SE**
NIP : 19680905 199103 1 002
Jabatan : Kasubbag Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : **SAIPUL AULA**
Jabatan : **sa** Kepala Puskesmas Bengkulu Kec Bengkulu selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan barang dibawah ini kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka untuk kepentingan/keperluan kelancaran tugas Pelayanan Program Keluarga Berencana pada Puskesmas Bengkulu Kecamatan Bengkulu dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dengan baik penyerahan barang dari **PIHAK PERTAMA** dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama Barang	Merk/Type	Jumlah	Dipergunakan untuk
1	VTP KIT		1 Set	Untuk Kelancaran Tugas Pelayanan Program
2	Minilaporatomi Set/Tubektomi Set		1 Set	Keluarga Berencana Pada Puskesmas Bengkulu Kecamatan Bengkulu

Barang Milik Daerah tersebut digunakan untuk kepentingan / keperluan kelancaran tugas Pelayanan Program Keluarga Berencana pada Puskesmas Bengkulu Kecamatan Bengkulu, telah dicatat dimasukkan dalam daftar Inventaris, sebagai Aset Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang diserahkan kepada pihak Puskesmas Bengkulu Kecamatan Bengkulu.

Setelah ditandatangani Berita Acara Serah Terima ini, maka berpindahlah hak dan tanggungjawab terhadap pemakaian dan pemeliharaan tersebut kepada **PIHAK KEDUA**.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), lembar I untuk **PIHAK PERTAMA** dan Lembar II untuk **PIHAK KEDUA**, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
sa KEPALA PUSKESMAS BENGKALIS
KECAMATAN BENGKALIS.

SAIPUL AULA
19680905 199103 1 002

PIHAK PERTAMA
PPTR.

BENNY NASRIAWAN. SE
NIP. 19680905 199103 1 002